

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

---

**Sekolah Perempuan Pulau:  
Aksi Kolektif Perempuan dalam Advokasi  
Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

*The Island Women's School:  
Women's Collective Action in Advocacy for Fulfilling Basic Needs*

**Penulis**

Ulya Niemi Efrina Jamson dan Hening Wikan Sawiji

**Editor dan Pengulas Naskah**

*Volume Editors and Reviewers*

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M.P. Setiawan

**Penyunting dan Penerjemah Naskah**

*Copy Editors*

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

### Untuk merujuk studi kasus ini:

Jamson, U.N.E., dan Sawiji, H.W., 2020. Sekolah Perempuan Pulau: Aksi Kolektif Perempuan dalam Advokasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar [The Island Women's School: Women's Collective Action in Advocacy for Fulfilling Basic Needs]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 137-163. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) dan [www.demisetara.org](http://www.demisetara.org).

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) dan [www.demisetara.org](http://www.demisetara.org).

---

### To cite this case study:

Jamson, U.N.E., and Sawiji, H.W., 2020. Sekolah Perempuan Pulau: Aksi Kolektif Perempuan dalam Advokasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar [The Island Women's School: Women's Collective Action in Advocacy for Fulfilling Basic Needs]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 137-163. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) and [www.demisetara.org](http://www.demisetara.org).

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) and [www.demisetara.org](http://www.demisetara.org).

## Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

## Ringkasan

Studi kasus ini mengangkat ikhtiar pembentukan Sekolah Perempuan, sebuah sekolah informal bagi perempuan pulau di desa kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Dengan dukungan KAPAL Perempuan dengan mitra mereka Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) di Sulawesi Selatan, perempuan pulau mengorganisir aksi kolektif mereka ke dalam beberapa kelompok perempuan akar rumput di masing-masing pulau, yang tergabung ke dalam Sekolah Perempuan Pulau. Sekolah ini menjadi wadah advokasi perempuan pulau untuk mengatasi berbagai permasalahan kompleks yang mereka alami sebagai perempuan pulau, seperti adalah keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya akses terhadap bantuan penguatan ekonomi dan perlindungan sosial, serta norma sosial yang menghambat pemberdayaan perempuan.

Penguatan kemampuan intrinsik dan praktis perempuan pulau didukung oleh berbagai pelatihan dari KAPAL Perempuan, yakni pendidikan tentang ideologi dan kesetaraan gender, pelatihan kepemimpinan, pengembangan pengetahuan teknis mengenai program jaminan sosial pemerintah. Selain itu, Sekolah Perempuan merupakan suatu mekanisme bagi perempuan pulau guna membangun dukungan dari sesama perempuan pulau, dan juga dalam berjejaring dengan pemerintah di tingkat desa dan kabupaten. Kegiatan Sekolah Perempuan membawa perubahan positif di desa. *Pertama*, partisipasi aktif perempuan pulau di dalam kegiatan Sekolah Perempuan membuat mereka lebih memiliki kesadaran kritis mengenai kesetaraan gender, serta lebih memahami hak-haknya terutama terkait akses terhadap program perlindungan sosial, serta berani mengungkapkan pendapat dan aspirasi di muka umum. *Kedua*, peningkatan kemampuan intrinsik dan praktis perempuan pulau membuat mereka mampu secara kolektif berpartisipasi dalam forum-forum Musrenbang dari level desa, kecamatan, sampai kabupaten, guna menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan perempuan secara lebih luas. Sebelum ada Sekolah Perempuan, partisipasi perempuan terpinggirkan dari forum-forum tersebut. *Ketiga*, usulan-usulan yang mereka sampaikan dalam forum pengambilan keputusan berhasil menyediakan akses kebutuhan dasar, tidak hanya bagi perempuan pulau, namun juga masyarakat pulau pada umumnya. Capaian terpenting adalah adanya alokasi Dana Desa untuk kegiatan simpan pinjam perempuan, yang mewujudkan modal usaha dan alternatif mata pencaharian bagi perempuan. Selain itu, perempuan pulau berhasil menginisiasi keberadaan fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, serta pengakuan keberadaan nelayan perempuan secara resmi guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan peralatan.

Keberhasilan awal advokasi anggota Sekolah Perempuan tersebut dapat terjadi karena adanya dukungan yang kuat dari jejaring perempuan di desa dan di kabupaten. Akan tetapi, perubahan situasi politik pasca pergantian kepala desa melemahkan dukungan bagi kegiatan Sekolah Perempuan, serta kembali meminggirkan mereka dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa. Dinamika politik juga membuat stagnan proses advokasi peraturan desa yang melembagakan Sekolah Perempuan sebagai mitra strategis pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dengan keberhasilan yang dicapai di awal upaya advokasi, norma sosial berubah secara perlahan dan belum menyeluruh. Bertolak belakang dengan penurunan dukungan di desa, partisipasi politik perempuan di tingkat kabupaten dan di desa justru meningkat, dan jejaring mereka menguat. Salah satu ketua kelompok Sekolah Perempuan dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam Pemilu 2019, dengan dukungan tokoh-tokoh elit pemerintah kabupaten. Walau ia tidak berhasil dalam pencalonannya, partisipasi politik perempuan ini merupakan manifestasi agensi perempuan pulau untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Lebih jauh lagi, partisipasi politik sehari-hari juga dilakukan perempuan pulau dengan pendirian pos pengaduan untuk melaporkan mengenai permasalahan dalam pemberian program perlindungan sosial. Pos ini menandakan bentuk alternatif pengaruh dan partisipasi kolektif perempuan dalam proses pembangunan di pulau, walau hanya secara informal, di tengah situasi politik desa yang tidak kondusif. Pos ini bertindak sebagai sikap simbolis perempuan dalam mengawasi pelaksanaan program perlindungan sosial di pulau-pulau mereka. Selain itu, pos ini pun menjadi ruang informal bagi sesama perempuan untuk membangun solidaritas dan saling berbagi informasi.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana peningkatan kemampuan intrinsik dan praktis perempuan pulau serta pengembangan jejaring perempuan membuat mereka mampu mengadvokasikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan membawa perubahan positif yang lebih luas di antara masyarakat pulau. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa perkembangan aksi kolektif perempuan tidak selalu berjalan secara linear, positif, maupun progresif. Dengan kata lain, perkembangan gerakan perempuan bisa berbeda antara tingkat desa dan tingkat kabupaten. Namun demikian, dukungan berkesinambungan dan penguatan jaringan dengan pemerintah desa dan kabupaten dapat memberikan kesempatan guna memastikan keberlanjutan aksi kolektif perempuan pulau.

## Summary

This case study examines the establishment of an informal Women's School (Sekolah Perempuan) in an island village in Pangkajene and Islands District, South Sulawesi. With the support of KAPAL Perempuan in partnership with the Community Empowerment and Assessment Foundation (YKPM) in South Sulawesi, island women organised to form grassroots women's groups in each island in the village, under the banner of the 'Women's School'. The School has become a vehicle for women's advocacy to respond to many complex challenges they face as island women, among others, restrictive social norms that limit women's opportunities, a lack of access to basic infrastructure to meet their needs such as electricity and clean water, and a lack of access to economic support and social protection programs.

Island women have augmented their intrinsic and practical skills by participating in various training and education activities for group members, such as education on gender equity and ideology, leadership training, as well as the development of knowledge and technical skills on accessing government's social protection programs. Moreover, the Women's School has become a mechanism through which island women can develop their networks of support, not only with fellow island women, but also with the district and village government.

The Women's School has effected several positive changes in the village. *First*, women's active participation in Women's School activities helped them to raise critical awareness among themselves and other women, especially on gender equity, rights and their access to social protection programs, and to be more confident in voicing their opinions and aspirations. *Second*, improvements of women's intrinsic and practical skills enabled them to collectively participate in village decision-making forums from which they had previously been marginalised. *Third*, their advocacy in these forums has resulted in the greater fulfilment of basic needs, not only those of the women, but also the needs of the island people in general. According to these women, their most significant achievement is gaining Village Fund allocations for women's savings and loans activities. Savings and loans opportunities helped meet women's needs for financial capital for new businesses and livelihood alternatives. Furthermore, women's advocacy has resulted in securing support and funds for the development of basic facilities such as clean water, sanitation facilities, and solar-powered electricity, as well as government recognition of fisherwomen that enable fisherwomen to access government-funded fishing equipment.

These early successes of the Women's School groups initially occurred with the strong networked support of the village and district governments. Yet, the political situation in the village changed when a new Village Head was elected, who sought to exclude these women from village decision-making meetings, which weakened support for Women's School activities. Such political dynamics have also delayed the passing of a draft village regulation that would have legitimised the Women's School as a strategic partner of the village government. These dynamics indicate that despite some early wins, in restrictive and patriarchal village power structures, changes in women's influence may sometimes only be partial, and often incremental.

In contrast with some of these setbacks, women's political participation both at the district and village levels has been strengthened in other ways. One of the group leaders of the Women's School was nominated as a candidate for district legislative elections in 2019, with the backing of elite political figures in the district. Although her candidacy was unsuccessful, her political participation was an expression of women's agency that was uncommon in the district and she has provided inspiration for others to express their political aspirations. In addition, women's everyday political participation is evident in the establishment of a Complaints Post in the village for people to report challenges encountered in social protection programs. The Post signifies an alternative form of women's collective influence and participation in village development processes, albeit informally, in the midst of an inconducive political environment in the village. The Post also embodies women's symbolic stance in monitoring the delivery of social protection programs in their islands. Furthermore, the Post provides an informal space for women to develop solidarity and share information.

The case study demonstrates how increasing women's expressions of agency through collective action, as well as developing their networks, has empowered them to advocate for the fulfilment of their needs, and brought benefits to the island community at large. The case study also illustrates how the trajectory of women's collective influence is not always upwards and positively linear over time. The trajectory of women's collective influence might also differ between village and district levels. Nevertheless, the ongoing presence of some supporters of the Women's School in the village, and much support from the district government, as well as women's own perseverance has helped to sustain the group's women's empowerment activities.

## Pendahuluan

Studi kasus ini membahas dinamika aksi kolektif perempuan yang tinggal di desa kepulauan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.<sup>1</sup> Aksi kolektif mereka meliputi kegiatan mengedukasi hak perempuan, mendorong akses jaminan perlindungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi perempuan miskin melalui partisipasi dalam Sekolah Perempuan Pulau. Sekolah Perempuan Pulau dibentuk oleh kemitraan antara KAPAL Perempuan dan YKPM.

Desa di kepulauan memiliki ciri kondisi geografis yang khas, yakni terbatasnya infrastruktur fisik yang menyambungkan akses antar pulau. Ini berakibat pada keterbatasan akses perempuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan, yang sering kali letaknya berada di pulau lain. Perempuan di desa kepulauan ini juga memiliki keterbatasan informasi mengenai jenis pelayanan perlindungan sosial yang disediakan negara, dan bagaimana mengaksesnya.

Di desa penelitian ini, norma sosial menempatkan laki-laki dalam posisi dan relasi sosial yang lebih tinggi. Hal ini berakibat dominasi laki-laki dalam proses pengambilan kebijakan di desa. Norma sosial yang patriarkis juga menghambat gerak perempuan di ruang publik. Misalnya, perempuan selama ini dianggap memiliki tugas utama untuk mengerjakan pekerjaan domestik, sehingga sepantasnya berdiam di rumah saja dan tidak perlu untuk mengikuti berbagai pertemuan warga yang membahas mengenai pelayanan perlindungan sosial. Kuatnya norma sosial yang patriarkis ini juga membuat banyak perempuan yang bahkan takut untuk sekadar datang ke kantor desa, sedangkan kelompok perempuan di desa yang rutin mengadakan pertemuan juga tidak ada. Hal ini menyebabkan informasi pelayanan perlindungan sosial hanya dapat diakses oleh para laki-laki sebagai pihak yang aktif mengikuti pertemuan-pertemuan formal di desa.

Pembentukan Sekolah Perempuan Pulau membuka kesempatan bagi perempuan pulau untuk memahami, dan merebut haknya, serta menggunakannya di ruang publik, khususnya dalam proses pengambilan keputusan di desa. Selain itu, Sekolah Perempuan juga memfasilitasi penguatan kapasitas diri mereka, seperti kemampuan intrinsik, keahlian praktis, peningkatan pengetahuan, serta pembentukan jaringan, yang pada gilirannya memperkuat peluang mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik di desa. Melalui keterlibatan dalam pendidikan kesetaraan gender dan pelatihan kepemimpinan, perempuan pulau kini menjadi lebih mampu untuk menyampaikan aspirasinya, lebih aktif di ranah publik, dan lebih paham mengenai hak-haknya terkait perlindungan sosial. Perempuan pulau pun kini menjadi terlibat lebih aktif dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui Sekolah Perempuan, perempuan pulau berhasil mengadvokasikan terbentuknya usaha simpan pinjam, pengakuan dan perhatian pemerintah akan adanya nelayan perempuan, pengadaan layanan dasar seperti akses air bersih, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menyediakan pasokan listrik yang memadai bagi desa.

Studi kasus mengenai pembentukan Sekolah Perempuan dan perubahan yang dialami perempuan pulau yang terjadi di desa ini akan dibagi ke dalam lima bagian. *Pertama*, permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di desa sebelum adanya Sekolah Perempuan. Bagian *kedua* menguraikan munculnya gelombang pertama pembentukan Sekolah Perempuan dan penguatan kapasitas untuk perempuan pulau (periode 2013-2014). Bagian ini juga menceritakan mengenai perubahan yang dialami bagi perempuan pulau dengan terbentuknya Sekolah Perempuan. Bagian *ketiga* menceritakan mengenai fase kedua Sekolah Perempuan, yaitu titik puncak keberhasilan perubahan yang dibawa melalui penguatan Sekolah Perempuan (periode 2015-2016). Keberhasilan ini dapat dilihat dari adanya pengakuan pemerintah desa terhadap Sekolah Perempuan dalam bentuk alokasi anggaran Dana Desa untuk Sekolah Perempuan terutama untuk kegiatan simpan pinjam, dan

---

<sup>1</sup> Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

juga alokasi dana untuk PAUD. Alokasi ini diusulkan oleh perwakilan Sekolah Perempuan dalam Musyawarah Desa maupun Musrenbang. Bagian *keempat* menjelaskan fase ketiga Sekolah Perempuan terkait perubahan situasi politik di desa pasca Pemilihan Kepala Desa tahun 2016, yang menyebabkan penurunan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan dalam memengaruhi kebijakan di desa. Bagian keempat ini juga akan menceritakan tentang berbagai upaya yang tetap dilakukan oleh perempuan di desa meskipun di tengah situasi politik desa yang kurang menguntungkan bagi mereka. Terakhir, bagian *kelima*, menjelaskan mengenai strategi YKPM-KAPAL Perempuan dalam melakukan mendampingi masyarakat dalam pembentukan Sekolah Perempuan Pulau. Bagian *keenam* menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pembentukan Sekolah Perempuan.

Yang juga perlu ditekankan dalam studi kasus adalah bahwa kemajuan yang dicapai oleh perempuan di desa, yang difasilitasi oleh organisasi masyarakat sipil tidak selalu meningkat secara progresif, melainkan terkadang mengalami *set back* atau kemunduran. Hal ini disebabkan karena upaya membangun aksi kolektif ini dipengaruhi oleh konteks desa dan kabupaten tempat inisiatif aksi kolektif berada. Hal ini adalah situasi alamiah dalam mendorong sebuah perubahan, dan sama sekali bukan berarti kegagalan, melainkan dinamika yang memang terjadi. Karena dinamika yang berlangsung maju-mundur ini, tulisan di bab ini dibagi-bagi berdasarkan fase-fase yang dapat memotret naik-turunnya dinamika naik-turun di setiap fase ini yang berdampak pada upaya membangun aksi kolektif perempuan.

### 1. Permasalahan Perempuan Pulau

Desa yang menjadi lokasi penelitian adalah salah satu desa di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Kondisi geografis paling menonjol adalah wilayahnya yang terbagi ke dalam empat pulau utama. Pusat pemerintahan desa ada di pulau terbesar, di mana fasilitas dasar layanan publik berada, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan saluran air bersih, dan infrastruktur jaringan sinyal telepon genggam yang keberadaannya memudahkan proses komunikasi dan penyebaran informasi. Pulau-pulau lainnya tidak memiliki sarana yang memadai seperti pulau utama. Durasi perjalanan antar pulau cukup bervariasi. Antar pulau terdekat memakan waktu perjalanan 5 menit, sementara perjalanan ke pulau terjauh memakan waktu 25 menit dengan menggunakan *jolorok* (perahu berukuran sedang). Sementara itu, perjalanan dari pulau utama menuju pulau Sulawesi, tempat ibu kota Kabupaten Pangkep, harus ditempuh selama 30 menit dengan menyeberangi Selat Makassar menggunakan kapal penumpang. Kapal tersedia setiap pagi dan sore, itupun tergantung cuaca. Bila cuaca buruk, tidak ada kapal yang beroperasi. Satu pulau besar dapat ditempuh berjalan kaki mengitari seluruh pulau kurang dari 20 menit.

Selain keterbatasan akses transportasi antar pulau, kondisi geografis desa kepulauan menimbulkan beberapa permasalahan kompleks bagi perempuan. *Pertama*, sebagaimana telah disebut di atas, infrastruktur layanan dasar sangat terbatas (saluran listrik, ketersediaan layanan Kesehatan, dan layanan Pendidikan), khususnya di pulau yang bukan. Walau sudah diusulkan dalam musyawarah desa, pemenuhan layanan kebutuhan dasar ini masih belum menjadi prioritas pembangunan desa.

*Kedua*, secara khusus terkait isu perempuan, akses informasi sangat terbatas, khususnya tentang perlindungan sosial dan kegiatan penguatan ekonomi seperti di bidang Pendidikan yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), di bidang penguatan ekonomi yakni Program Keluarga Harapan, dan di bidang kesehatan yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS). Khusus terkait dengan layanan bagi perempuan adalah pelayanan persalinan di bidan.<sup>2</sup> Semua layanan ini bersifat cuma-cuma dari negara. Memang tidak semua layanan ini terkait langsung dengan kebutuhan perempuan, tapi ketiadaan layanan akan membuat warga dan perempuan desa, harus merogoh

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Azahra, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019; Wawancara dengan Lulu, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019.

kantong mereka sendiri untuk memperoleh layanan. Ketiadaan informasi yang memadai terkait layanan kerap dimanfaatkan oleh petugas pelayanan dasar dengan meminta pembayaran dari para perempuan untuk mendapatkan layanan di rumah pribadi petugas. Secara ekonomi, mayoritas perempuan pulau memiliki status ekonomi yang lemah karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang bisa diandalkan sebagai sumber penghidupan. Penghasilan dari pekerjaan yang ada berupa pekerjaan mengikat rumput laut, atau mengupas kepiting. Upahnya sangat kecil. Khusus terkait nelayan perempuan, keberadaan mereka belum diakui oleh negara. Akibatnya mereka tidak mendapatkan akses layanan yang biasanya didapat oleh para nelayan laki-laki, seperti pengadaan kapal dan alat penunjang kegiatan mencari penghidupan di laut.<sup>3</sup>

*Ketiga*, adanya norma sosial yang tidak pro perempuan, dan karenanya menghambat kemajuan perempuan di desa. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adat Bugis menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Akibatnya, relasi gender sangat timpang, baik di kehidupan privat maupun di publik. Tempat perempuan adalah di rumah mengurus anak dan suami.

*“Adat Bugis itu kalau perempuan ya ibu rumah tangga di rumah saja, kalau laki-laki pengambil keputusan. Dulu itu kalau masak kepala ikan dikasih bapak dulu, yang makan dulu suami.” (Julianti, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Akibat norma sosial ini, para perempuan khususnya perempuan muda, mengalami hambatan untuk berperan aktif terkait persoalan-persoalan di luar urusan keluarganya. Perempuan-perempuan berusia muda dianggap tidak pas untuk beraktivitas di luar rumah, kecuali untuk keperluan rumah tangga mereka. Hal tersebut membuat para perempuan desa tidak pernah mengenal warga desa lain dari pulau selain warga di pulau tempatnya tinggal.

*“Ada juga dari pandangan masyarakat yang belum terbuka ada yang menyampaikan sama Bapak “Kok kamu bisa-bisanya memberikan izin anak kamu pergi ini, pergi ini? Nanti anak kamu hamil loh”. Kan perempuan di kampung saya dilarang keluar jauh-jauh, walaupun di dalam kampung, kalau pergi jalan satu atau dua jam pulang bisa dicari, kena cerita lagi. Saya sampai beberapa kali kena pukul gara-gara begitu. Kena pukul orangtua, karena begitu dilarang keluar, diizinkan keluar tapi sebentar. Kalau lama lewat dari jam yang ditentukan dipukul lagi.” (Julianti, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Dampak lanjut dari norma sosial ini adalah pendidikan bagi perempuan tidak menjadi prioritas. Masih banyak perempuan pulau yang belum bisa membaca dan menulis. Perempuan di desa banyak yang putus sekolah, karena harus membantu orang tua untuk mencari nafkah. Perkawinan anak juga sering dianggap sebagai solusi permasalahan ekonomi yang mereka hadapi<sup>4</sup>. Banyak dari perempuan miskin dinikahkan segera setelah tamat SD.<sup>5</sup>

Lebih jauh lagi, kurangnya tingkat pendidikan perempuan membuat rendahnya kepercayaan diri para perempuan. Mereka tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan orang asing atau aparat desa yang berseragam. Mereka cenderung menghindari dan bersembunyi di dalam rumah jika ada orang luar yang datang

<sup>3</sup> Wawancara dengan Laila, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Julianti, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Hariri, laki-laki warga desa, desa penelitian di Pangkep, 24 Februari 2019; Wawancara dengan Robiah, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 24 Februari 2019; Wawancara dengan Badriah, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019.



ke pulau, karena mereka tidak tahu harus berbicara apa.<sup>6</sup> Hal ini kemudian membuat para perempuan tidak terlibat dalam pertemuan tingkat desa maupun dusun yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan publik.<sup>7</sup>

## **2. Fase I: Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembentukan Kelompok Sekolah Perempuan Pulau (Periode 2013 - 2014)**

Studi kasus ini menguraikan mengenai perkembangan Sekolah Perempuan Pulau melalui tiga fase. Fase pertama, yakni periode tahun 2013 – 2014, dapat dianggap sebagai fase awal menuju pencapaian fasilitasi aksi kolektif perempuan desa di kepulauan, dan menjadi fondasi penting bagi fase berikutnya. Setiap fase memiliki dinamika sendiri termasuk situasi kemunduran akibat konteks desa yang berubah. Pada fase pertama ini, capaian utama yang sangat penting dan perlu digarisbawahi adalah keberhasilan dalam membentuk Sekolah Perempuan Pulau dan membangun kesadaran kritis anggotanya untuk melakukan perubahan.

### **2.1. Pembentukan Sekolah Perempuan Pulau sebagai upaya membangun gerakan kolektif perempuan pulau**

Difasilitasi oleh Kapal Perempuan dan YKPM, Sekolah Perempuan Pulau terbentuk pada tahun 2014. Terdapat lima kelompok kecil Sekolah Perempuan Pulau, yang disesuaikan dengan fitur geografis desa yang terdiri dari empat pulau. Di satu pulau terbesar terdapat dua kelompok, serta masing-masing satu kelompok di tiga pulau kecil lainnya. Banyaknya anggota masing-masing kelompok kurang lebih sejumlah 25 orang.<sup>8</sup>

Salah satu perempuan dari pulau terbesar di desa, yaitu Cahaya, dipilih sebagai koordinator umum serta merangkap sebagai salah satu ketua kelompok kecil di pulauanya. Cahaya dipilih sebagai koordinator umum Sekolah Perempuan Pulau karena sejak awal ia sangat antusias dan proaktif untuk melakukan sesuatu bagi perempuan. Secara individual ia mendekati pihak YKPM yang sedang melakukan pengenalan tentang konsep Sekolah Perempuan. Ia meminta untuk menjadi bagian dari kegiatan tersebut dan menawarkan menggunakan rumahnya sebagai lokasi kegiatan.

*"Awalnya kan ada teman dari YKPM datang dulu survei, tanya-tanya dulu. Awal mulanya ya. Benar-benar Intan [staf lapangan YKPM] tanya satu-satu itu orang. Dia keliling itu. Bayangkan selama satu tahun itu dia gali kita, tanya-tanya kita. Baru diajak-ajak. Lama-lama dia ketemu saya. Mungkin saya sering ngoceh-ngoceh ya. Saya panggil nih, pakai rumah saya. Katanya, 'Mau sekolah? Kita bikin Sekolah Perempuan' Kita curhat sesama kan, biasanya kan tidak ada yang mau mendengar kita sebagai perempuan. Nah, kita bentuk nih satu kelompok, kita panggil yang mana di situ diprioritaskan dulu yang tidak mampu ekonomi." (Cahaya, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Dalam perkembangannya, sosok Cahaya menunjukkan kemampuan personal yang baik dan berperan menjembatani CSO dengan para perempuan desa. Ia juga memotivasi dan menjaring ketertarikan perempuan untuk terlibat di dalam kegiatan Sekolah Perempuan.<sup>9</sup>

Pembentukan kelompok-kelompok di masing-masing pulau membuka peluang bagi lebih banyak perempuan desa untuk bergabung sebagai anggota Sekolah Perempuan. Salah satunya adalah Julianti, yang tertarik untuk bergabung setelah mendengar mengenai Sekolah Perempuan dari kakak perempuan dan tetangganya. Julianti

<sup>6</sup> Wawancara dengan Julianti, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019; Wawancara dengan Laila, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Intan, *community organizer* YKPM, Pangkep, 19 Februari 2019; Wawancara dengan Cahaya, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019; Wawancara dengan Rini, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 23 Februari 2019; Wawancara dengan Istiqomah, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 23 Februari 2019; Wawancara dengan Robiah, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 24 Februari 2019.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Julianti, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 3 Maret 2019.

<sup>9</sup> Pada saat ini, tugas koordinator dibantu oleh Julianti, salah satu ketua kelompok lainnya, karena Cahaya disibukkan dengan anaknya yang baru lahir. Julianti kini yang memegang peran pengorganisasian dan advokasi sehari-hari di desa. Namun demikian, Cahaya masih aktif dalam kegiatan Sekolah Perempuan dengan peran yang terbatas dan menjadi sosok yang dihormati oleh perempuan pulau lainnya.

kemudian menawarkan diri untuk bergabung ketika staf lapangan YKPM datang ke pulau tempat tinggal Julianti. Setelah itu, Julianti semakin aktif mengikuti kegiatan dan kemudian terpilih sebagai ketua kelompok di pulaunya serta kerap mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh YKPM di Makassar.

*“Dulu pertama bukan Kak Intan yang ajak tapi saya yang menawarkan diri, ‘Boleh ikut juga tidak?’ Saya tanya dulu informasi dari Ibu Maryam satu rumah tidak boleh ikut dua orang, oh mungkin tidak bisa kali ya. Saya tanya sama Alya, apa yang dipelajari? Kaya Sekolah Perempuan, sekolah buta huruf. Oh tidak mungkin ikut lagi dong berarti kata Bu Maryam satu rumah tidak boleh dua orang pas saya ikat rumput laut Kak Intan jalan ke sini untuk ngajak yang punya rumah sebelah, saya bilang, ‘Kak saya boleh ikut juga tidak?’. Ya waktu itu saya yang menawarkan diri, terus saya bilang Kak Intan, ‘Oh mau juga? Ya boleh. Namanya siapa?’. Waktu itu diwawancarai.” (Julianti, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Para perempuan di desa tertarik bergabung menjadi anggota Sekolah Perempuan karena dua alasan utama. *Pertama*, keingintahuan tentang kegiatan yang ditawarkan oleh Sekolah Perempuan. *Kedua*, mengira bahwa Sekolah Perempuan akan memberi pelajaran baca-tulis-hitung pada mereka, keterampilan yang sangat mereka butuhkan. Setelah mengikuti berbagai pertemuan, beberapa anggota Sekolah Perempuan berpartisipasi secara aktif karena menganggap bahwa Sekolah Perempuan dapat mendengarkan permasalahan yang selama ini mereka hadapi, sekaligus dapat menjembatani kebutuhan yang mereka perlukan. Sedangkan sebagian perempuan lainnya senang dengan kegiatan-kegiatan pelatihan Sekolah Perempuan karena sering dilaksanakan di luar Pulau dan diadakan di hotel<sup>10</sup> yang belum pernah mereka alami sepanjang hidup mereka, tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun.

*“Jadi kita diterangkan sama Kak Intan [Community Organizer YKPM], apa visi misi Sekolah Perempuan, kita hanya membentuk kelompok. Kita pelatihan tentang kepemimpinan perempuan, gender. Keluar pulau itu di Hotel Prima.” (Alya, Anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Para perempuan pulau pun senang dan antusias atas materi yang mereka dipelajari di sekolah. Sekolah Perempuan melandasi materi pembelajarannya berbasis pada kesadaran kritis untuk menyadari hak-haknya sebagai perempuan, mendorong mereka aktif bersuara, dan berperan di ruang publik untuk merebut hak mereka.

*“Kita diundang ke sana untuk ikut pertemuan. Terus disuruh menggambar pulau, kebetulan kan saya ndak tahu menggambar pulau bagaimana baru kali ini disuruh. Dari situ lah saya berpikir semoga aja di sinilah tempat saya untuk membuka pikiran saya dan mengadu kenapa saya tidak pernah dapat bantuan. Saya mau ikut karena saya mau mencoba. Mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin ini jalan satu-satunya yang harus saya lakukan. Karena saya dulu kan, saya tidak berani bercerita. Jangankan sama Pak Desa, sama Pak Dusun saja saya takut. Daripada kita cerita begini salah lagi. Dimarahin lagi. Ketakutan, emang, takut.” (Laila, Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019).*

*“Jadi pembelajaran pertamanya itu gambar, menggambar keluarga. Ada ayah, ibu, tante, nenek. Suruh menuliskan di kertas terus pelajarannya memperkenalkan diri dulu, keluarga, lingkungan, pekerjaan sehari-hari, sampai akhirnya ikut pelatihan-pelatihan.” (Laila, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Terdapat beberapa agenda Sekolah Perempuan. *Pertama*, menempatkan kebutuhan perempuan sebagai salah satu prioritas pembangunan dengan menggunakan Dana Desa. Dana Desa selama ini masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur fisik. *Kedua*, mengkonsolidasikan upaya ini agar bisa lebih berkelanjutan melalui terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Sekolah Perempuan dan legalitasnya sebagai mitra kegiatan pembangunan pemerintah desa. *Ketiga*, melakukan pendekatan pada masyarakat desa (termasuk laki-laki)

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Jariyah, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 27 Februari 2019.

untuk memberikan kesempatan dan dukungan pada perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Aktivitas pada agenda pertama dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan rutin yang biasanya tiga kali dalam sebulan. Pertemuan rutin pertama kali dilakukan untuk memperkenalkan materi terkait modul pendidikan dengan perspektif kritis khususnya keadilan gender, memupuk keberanian dan kepercayaan diri para anggotanya, dan materi tentang perlindungan sosial bagi perempuan. Materi disusun oleh KAPAL Perempuan. Pertemuan selanjutnya rutin dilakukan di rumah koordinator untuk forum besar lintas pulau, dan forum kecil di masing-masing pulau. Lokasi dan waktu pertemuan ditentukan oleh YKPM melalui staf lapangan/*community organizer* yang rutin berkunjung dan tinggal selama beberapa waktu di desa. Ia bertanggungjawab mengorganisir Sekolah Perempuan di desa.

Selain pertemuan rutin, terdapat pula pelatihan-pelatihan mengenai kepemimpinan perempuan serta pengetahuan teknis tentang program perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat desa. Kesemuanya materi menggunakan perspektif kritis gender. Pelatihan tersebut memfasilitasi agar perempuan pulau menjadi pribadi yang kritis dalam melihat praktik sosial khususnya ketidakadilan gender, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi tim pemantau dari program perlindungan sosial yang disediakan bagi warga desa.

## 2.2. Perubahan setelah pembentukan Sekolah Perempuan

Dalam fase ini, terdapat beberapa perubahan yang dialami oleh warga desa setelah fasilitasi aksi kolektif perempuan desa melalui kegiatan Sekolah Perempuan. Secara perlahan, kesadaran kritis terbangun melalui kegiatan Sekolah Perempuan, dan membantu mereka untuk memiliki kesadaran akan kesetaraan gender.

*"Sebelum ada Sekolah Perempuan saya tidak berani. Keluar saja dari rumah kalau ada orang dari pake baju dinas jalan di dermaga saja saya sembunyi. Saya takut, takut mengeluarkan sesuatu, takut salah. Akhirnya Sekolah Perempuan jalan satu tahun, di situlah muncul keberanian saya. Bahwa saya punya tempat di sini, saya punya hak di sini. Saya sudah tahu bahwa hak saya ada di sini, dulu kan kita tidak tahu hak kita di mana, kita mau cerita di mana. Kegiatannya 3 kali satu bulan kayanya." (Laila, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019).*

Mereka juga berani mengungkapkan gagasan di depan forum umum, serta mengerti hak-haknya terutama terkait dengan program perlindungan sosial.

*"Manfaatnya apa yang awalnya saya tidak tahu, karena saya dari dulu pengen bantu warga yang kesusahan jadi tidak harus memberi bantuan berupa uang tapi bisa saya bantu tenaga kah, atau kalau ada yang minta tolong buat KK [Kartu Keluarga], bisa bantu ngurusin langsung ke capil [merujuk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil]. Kalau dulu ke desa saja takut apalagi ke daratan. Tapi alhamdulillah setelah ikut Sekolah Perempuan, perubahan terbesarnya bisa keluar rumah tidak dimarahi sama orangtua. Sekarang kayanya rata-rata pola pikir orangtua sudah berubah. Mungkin seiring, kalau di keluarga saya sih saya masuk Sekolah Perempuan akhirnya terbuka, tidak boleh dilarang keluar." (Julianti, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Para perempuan desa juga tidak lagi merasa takut berbicara dengan aparat pemerintah yang berseragam.

*"Karena saya dulu kan, saya tidak berani bercerita. Jangankan sama Pak Desa, sama Pak Dusun saja saya takut. Daripada kita cerita begini, salah lagi, dimarahin lagi. Ketakutan emang. Takut. Sebelum ada Sekolah Perempuan, saya tidak berani. Keluar saja dari rumah, kalau ada orang dari pake baju dinas jalan di dermaga saja, saya sembunyi. Saya takut, takut mengeluarkan sesuatu, takut salah. Kalau ada orang pakai baju dinas,*

*ibu-ibu itu pada ndak berani. Beri salam saja ibu-ibu, yang pakai baju dinas saja "Assalamualaikum", cuma suaranya pelan-pelan saja." (Laila, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

*"Mungkin karena dulu waktu masih kecil, dari orang tua suka menakut-nakuti. Ada polisi, itu ditangkap jadi dari keingat masih kecil waktu ditakut-takuti, sampai lulus SD takut kalau ada pendaatang takut sembunyi. Dua tahun lulus SD sudah tidak terlalu takut habis ikut paket B sudah tidak lagi, sudah masuk usia 18 tahun tidak lagi sampai akhirnya masuk Sekolah Perempuan dijelaskan di situ, pemerintahan begini, hak perempuan ini, akhirnya tau alhamdulillah sudah berani bercerita, berbicara dulunya takut, berbicara di depan satu dua orang takut, sekarang bisa walaupun di depan forum sudah berani. Jadi sudah ada perubahan, itu perubahan paling terdepan berani berbicara di depan forum. Kalau dulu bercerita di satu dua orang saja ini lutut bergetar... Mungkin karena masih takut alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi." (Julianti, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Para laki-laki pun mereka merasa mendapat perspektif baru mengenai relasi antara perempuan dan laki-laki baik di ranah domestik maupun publik. Secara perlahan juga para perempuan sudah tidak lagi secara ketat dilarang para suami untuk beraktifitas di luar rumah, termasuk di luar pulau.

*"Saya rasa bagus, soalnya yang tidak mengetahui juga sekarang Ibu sudah memberi tahu, begini Pak, ada begini. Saya sangat mendukung soal pengetahuan, saat pertama Ibu datang masuk cerita lalu ya dilempar ke saya "Bagaimana, Pak?" ya saya silahkan silahkan selama itu positif silahkan." (Qodarudin, laki-laki warga desa, Desa penelitian di Pangkep, 27 Februari 2019)*

Kehadiran Sekolah Perempuan dianggap mendorong perubahan terhadap nilai-nilai adat yang selama ini dianggap menghambat peran perempuan di ranah publik. Materi kesadaran kritis yang diperoleh di Sekolah Perempuan selalu menekankan bahwa perempuan desa juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan menyuarakan aspirasinya terutama mengenai jalannya pemerintahan desa. Materi ini turut disampaikan pada orang-orang terdekat mereka, seperti suami dan anggota keluarga lain seperti orang tua, terutama figur ayah yang selama ini mengatur dan membatasi ruang gerak perempuan, termasuk akses pendidikan maupun mobilitas untuk bepergian ke luar pulau. Hal ini dilakukan untuk mengubah pola berpikir dan meningkatkan kesadaran adil gender bagi anggota keluarga lainnya. Misalnya, telah terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam hal pembatasan ruang gerak bagi perempuan terutama yang masih berusia relatif muda. Awalnya, perempuan yang pergi ke luar pulau dan pergi ke kota tanpa didampingi laki-laki dari keluarganya kerap dianggap sebagai "bukan perempuan baik-baik". Terlebih, kegiatan pelatihan Sekolah Perempuan yang dilaksanakan di hotel, semakin memperburuk stigma tersebut, mengingat bagi masyarakat pulau, dulunya hotel dianggap sebagai tempat dengan asosiasi yang kurang baik. Namun, melalui pendekatan dan memberikan pengertian kepada keluarga, akhirnya anggota Sekolah Perempuan telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari keluarga untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh YKPM di ibu kota kabupaten Pangkep dan di Makassar.

*"Sudah tapi kalau ikut sama orang tua baru bisa jauh-jauh. Ikut paket B di Bungoro, kecuali ada tertentu tertentu begitu, tapi kalau misalkan pergi pergi sama teman-teman jangan. Kecuali ada kepentingan baru bisa keluar, kepentingannya juga ortu harus tau, ditelusuri mau ke mana apa kegiatannya, dengan siapa. Kalau untuk jalan jalan keluar sama teman-teman jangan... Mungkin seiring, kalau di keluarga saya sih saya masuk Sekolah Perempuan akhirnya terbuka, tidak boleh dilarang keluar. Ya cerita ke keluarga. Nunjukin ini, ini loh pelajaran yang diikuti waktu sekolah kalau ikut pertemuan." (Julianti, Anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Sebelum bergeser pada fase II, dari uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa fase ini merupakan fase awal pembentukan pengetahuan kritis perempuan desa akan hak dan peran perempuan, dan sikap kritis terhadap praktik kehidupan sehari-hari yang tidak adil gender. Di fase ini terlihat capaian-capaian yang diperoleh berupa peningkatan kesadaran tidak hanya oleh perempuan desa anggota Sekolah Perempuan, melainkan juga

peningkatan kesadaran suami dan anggota keluarga lainnya. Akibatnya telah lahir faktor yang memudahkan (*enabling*) bagi keberlanjutan kegiatan aksi kolektif perempuan di fase berikutnya. Satu faktor yang memudahkan kegiatan aksi kolektif yang difasilitasi oleh Sekolah Perempuan adalah figur kepala desa yang sangat mendukung kegiatan perempuan ini, baik di fase I dan II (yang akan digali di bagian berikut ini). Situasi terkait keberadaan dukungan kepala desa terhadap Sekolah Perempuan inilah yang mengalami perubahan saat pergantian kepala desa, yang akan diurai dalam pembahasan fase III.

### **3. Fase II: Penguatan Sekolah Perempuan Desa (Periode 2015 – 2016)**

Setelah kesadaran kritis para perempuan desa pulau relatif menguat di fase pertama, yang disertai dengan keterampilan teknis kepemimpinan dan keterampilan individual, di fase II anggota Sekolah Perempuan didorong berperan di ranah publik yakni forum-forum desa. Dalam forum ini para perempuan desa difasilitasi untuk menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan publik Bersama pemerintah desa.

#### **3.1. Partisipasi dalam Musrenbang**

Pembelajaran dari Sekolah Perempuan di fase I telah membuka relasi yang baik antara Sekolah Perempuan dengan aparat desa. Sebagaimana telah disinggung sekilas di atas, sosok kepala desa adalah figur yang terbuka, dan mendorong partisipasi masyarakat, termasuk perempuan. Beberapa kali beliau menjalin kerjasama dengan anggota Sekolah Perempuan, seperti Julianti, dalam menjalankan program-program terkait pelayanan sosial di desa seperti PKH dan jaminan kesehatan. Kerjasama tersebut dibangun utamanya untuk permasalahan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat desa. Keadaan geografis desa yang berbentuk kepulauan mendorong Kepala Desa untuk merekrut beberapa anggota Sekolah Perempuan seperti Julianti dan Kartika sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa di pulau tempat tinggal mereka masing-masing untuk membantu warga dalam mengurus berbagai keperluan administrasi dalam mengakses program jaminan sosial dari pemerintah. Mereka lebih dikenal dengan sebutan “staf pulau”.

*"Perempuan banyak terlibat di pemerintahan waktu masih jamannya Pak Desa dulu. Pak Desa juga memberikan ruang kepada kami, para anggota Sekolah Perempuan ikut bekerja di pemerintahan, meskipun tidak harus jadi staf. Maksudnya seperti kalau ada pendataan dihubungi, 'Julianti ini ada pendataan tolong didata, ada warga sekian, ini warga tolong pergi didata' Terlibat masalah pendataan, rapat-rapat seperti musrenbang, terus penambahan pemberi makanan anak balita di posyandu." (Julianti, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Relasi yang baik ini juga terwujud dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah desa mengundang Sekolah Perempuan secara khusus untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa. Berbekal materi dari pertemuan dan pelatihan yang telah diberikan, anggota Sekolah Perempuan seperti Cahaya dan Julianti pun aktif terlibat diskusi yang ada dalam Musrenbang desa. Selain aktif berpendapat, dalam forum, para anggota Sekolah Perempuan juga saling mendukung satu sama lain ketika salah satu dari mereka memberikan usulan tertentu.<sup>11</sup>

*"Pernah ikut musrenbang waktu Pak Desa dulu. Karena memang kita dipanggil sama Kak Cahaya, ditelepon ada musrenbang desa nanti jam sepuluh di kantor. Karena dia kan dibilang sama Bu Sekdes sama Pak Desa. Pasti nanti kan Kak Cahaya yang mengasih tahu sama kita anggota Sekolah Perempuan bahwa nanti ada begini di kantor desa, nanti ada musrenbang desa." (Kiki, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019)*

*"Mungkin karena sudah sering dikasih pemahaman sama teman-teman YKPM sering diundang ke rapat-rapat, pertemuan sehingga sudah terbiasa alhamdulillah sudah ada keberanian... Kalau disuruh bercerita ayo beranikan diri, saya ini termotivasi sama teman-teman YKPM ingin seperti mereka bisa berani bercerita, memutuskan*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Laila, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019.

*sendiri dalam pengambilan keputusan... Iya, begitu akhirnya bisa bercerita. Tapi sampai berapa pertemuan begitu yang hanya diam karena masih belum berani. Kalau di pertemuan Musrenbang desa sudah agak berani, waktu kapan ya? Ya bercerita sih bercerita kalau kak Intan bilang "ayo Julianti cerita" ada dorongan, ya cerita lagi meskipun masih gemetar, ada beberapa kali kayanya mbak. Bercerita sih kalau ada dukungan dari teman teman YKPM." (Julianti, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

*"Waktu pertama ikut Musrenbang takut takut, tapi waktu kedua ketiga sudah tidak lagi. Saya sempat pernah jadi pembaca alur pertemuannya disuruh Staf Lapangan YKPM. Dia bilang "Julianti aja yang jadi ininya". Seru juga sih, masih bergetar tapi tidak terlalu bergetar lagi. Saya "Kak takut kak" "Ah enggak, kalau kamu masih takut takut bagaimana kamu mau jadi pemimpin perempuan" itu dorongannya Staf Lapangan YKPM. Sama ini dulu waktu masih belum tau yang namanya, bisa dibilang "kacamata gender" pluralisme lah." (Julianti, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Lebih lanjut, upaya kolektif Sekolah Perempuan dalam mengawal proses usulan perempuan dalam Musrenbang bukan hanya dilakukan di level desa melainkan sampai ke level Kabupaten. Perwakilan Sekolah Perempuan terlibat dalam Forum SKPD yang diselenggarakan di Gedung BAPPEDA Kabupaten Pangkep pada bulan Maret tahun 2015. Proses keterlibatan perempuan dalam Forum SKPD ini juga didokumentasikan dalam majalah Kabar Perempuan Pulau dalam rubrik "Perempuan Bergerak". Dalam rubrik tersebut, Ibu Cahaya, sebagai perwakilan Sekolah Perempuan mencatat bahwa kehadiran perempuan desa yang mengawal usulan tersebut sangat penting agar usulan-usulan dari Musrenbang Desa sampai Kecamatan menjadi prioritas di beberapa SKPD. Menurut Ibu Cahaya, usulan dari Musrenbang Desa rentan untuk tidak diperhatikan di Kabupaten dengan alasan keterbatasan dana.

*"Berkat adanya perwakilan sekolah perempuan dari desa sehingga usulan-usulan dari Musrenbang Desa sampai Kecamatan menjadi prioritas di beberapa SKPD... Pertemuan Forum SKPD ini dan menjadi pelajaran buat kami dari anggota sekolah perempuan untuk perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya agar mengusulkan masalah-masalah yang ada di pulau yang sangat mendesak terutama masalah perempuan." (Cahaya, Kabar Perempuan Pulau, Edisi III, Maret 2015, halaman 9)*

Capaian terpenting dari keterlibatan aktif perempuan pulau di Musrenbang desa ialah pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Perempuan. Pada Musrenbang desa tahun 2015, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebanyak Rp7 juta dari Dana Desa sebagai modal untuk kegiatan koperasi. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut merupakan usulan dari anggota Sekolah Perempuan. Dana dikelola oleh koordinator Sekolah Perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dimaksudkan sebagai modal para perempuan pulau untuk berwirausaha dalam upaya menopang kehidupan perekonomian keluarganya. Bentuk usaha yang diproyeksikan pun bervariasi mulai dari produksi dan pemasaran kue hingga pendirian toko-toko kelontong di pulau.

*"Dilibatkan anggota Sekolah Perempuan itu di musrenbang desa waktu Pak Bahrudin menjabat. Kalau dulu Pak Bahrudin waktu menjabat kepala desa, ada memang dikhususkan undangan anggota Sekolah Perempuan. Malahan anggota Sekolah Perempuan itu dikasih dana, simpan-pinjam perempuan. Yang kelola itu Sekolah Perempuan, koordinator itu Ibu Cahaya." (Laila, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Bagi anggota Sekolah Perempuan, keberhasilan mereka dalam mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa untuk SPP merupakan capaian yang sangat signifikan, karena SPP merupakan perwujudan kebutuhan para perempuan yang merasa kesulitan mencari alternatif mata pencaharian di pulau. Adanya SPP memungkinkan mereka mengakses modal untuk berwirausaha. Selain itu, pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan SPP menunjukkan bahwa perempuan desa mampu mengartikulasikan kepentingan mereka dengan cara berpartisipasi dalam Musrenbang desa.

Karena SPP dikelola sendiri oleh perempuan desa, perempuan merasa memiliki kendali atas hidupnya dan menjadi jawaban atas kebutuhan ekonomi mereka.<sup>12</sup> Selama ini, tanggungjawab pemenuhan kebutuhan keluarga dipegang oleh para laki-laki, baik suami maupun anak laki-laki, yang sebagian besar adalah nelayan atau kegiatan budidaya rumput laut. Posisi perempuan desa di wilayah kepulauan ini, dan keterbatasan alternatif lapangan pekerjaan, membuat peran mereka pun sebatas “membantu suami” seperti mengikat rumput laut maupun jaring kepiting. Adanya modal wirausaha yang disediakan oleh Simpan Pinjam Perempuan memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kegiatan Simpan-Pinjam makin bermanfaat secara khusus bagi para perempuan kepala keluarga yang tidak memiliki sandaran sumber ekonomi. Selama ini, bila perempuan ini memulai usaha, mereka umumnya meminjam uang sebagai modal usaha penjualan kue maupun untuk membeli bibit rumput laut.

Sayangnya, keberadaan kegiatan Simpan-Pinjam tidak berlangsung lama. Hal disebabkan karena tidak ada mekanisme kontrol dan monitoring internal yang jelas terkait peminjaman dan pengembalian dana. Misalnya, tidak ada syarat yang harus dipenuhi calon peminjam, ketentuan bunga, dan aturan waktu pengembalian uang. Akibatnya modal simpan pinjam sebesar Rp7 juta tersebut tidak bertambah dan justru habis dipinjam para anggota. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit di desa menyebabkan uang yang ditanam dalam usaha belum berputar. Akibatnya sulit menagih pinjaman dari para anggota yang meminjam. Penyebab lain kesulitan menagih ialah perasaan tidak enak meminta perempuan-perempuan melunasi pinjaman mereka. Usaha Simpan Pinjam Perempuan pun menjadi stagnan.

*“Makanya dulu itu ibu-ibu enak, kalau mau bangun usaha tinggal ambil dana di situ, di SPP. Tapi sekarang mungkin tidak ada lagi karena menipis. Semakin ndak berkembang semakin menipis karena kebanyakan ibu-ibu tidak membayar. Pinjam 10 orang yang membayar cuma 5 orang atau 3 orang, jadi yang 8 orang ke mana. Jadi kalo ditagih [mereka] ngeluh kita kan ndak enak, kalau sudah bilang “belum ada”.” (Laila, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

### **3.2. Inisiatif Perempuan untuk Mengakses Fasilitas Air Bersih**

Peningkatan kapasitas politik perempuan melalui Sekolah Perempuan pulau juga berhasil membuka akses fasilitas pelayanan publik berupa air tawar bersih bagi warga desa. Salah satu kebutuhan kunci perempuan pulau di desa penelitian adalah air tawar bersih dan akses pada sanitasi, dan keduanya ini sangat minim di desa. Oleh karena itu mereka mendorong pengadaan bak air dan kakus umum bagi seluruh warga di desa. Di musim kemarau, warga pulau seringkali mengalami kesulitan air bersih. Ketika hal itu terjadi, perempuan pulau harus memutar otak untuk dapat menyediakan air bersih untuk kebutuhan keluarga. Biasanya mereka membeli air di pulau lain yang memiliki fasilitas air bersih. Apabila suami mereka sedang melaut, dan tidak ada kapal yang bisa menyeberangkan ke pulau sebelah untuk membeli air, para perempuan terpaksa memanfaatkan air asin sebagai satu-satunya sumber air yang tersedia.

*“Kalau hujan [banyak air] tawar, kalau musim kemarau kurang air, perempuan harus ke [pulau] sebelah lagi beli air. Iya karena saya sering koordinasi ke desa, kami butuh penampungan air bersih, Pak Dusun juga butuh, dan pernah bilang ke Pak Desa tapi dia bilang nanti-nanti saja. Kita itu minta bak air per rumah, itupun baru sebagian, ya bertahap, kalau masyarakat nggak tau, ngoceh mulu, disalahkan lagi RT, dusun. Penampungan air bersih supaya ibu-ibu dan perempuan kita agar nggak bingung ambil air bersih apalagi kemarau lihat aduh air habis, kalau anak ambil ke Salemo gak mau, beban lagi ke perempuan, kalau ada tampungan kan tidak kesulitan lagi. Oh ya jelas, urusan air urusan perempuan. Karena pagi-pagi laki-laki ke laut. Kalau anak mau, suami mau*

<sup>12</sup> Wawancara dengan Lulu, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019; Wawancara dengan Laila, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 1 Maret 2019; Wawancara dengan Julianti, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019; Wawancara dengan Jariyah, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 1 Maret 2019; Wawancara dengan Kartika, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 1 Maret 2019.

*dari Salemo angkat air ya nggak beban, kalau merekanya nggak mau, jadi beban, pasti kepikiran, air sudah habis. Ya udah ambil di sumur, air asin. Saya pernah usul Pak Dusun juga bak air per rumah, yang kecil saja. Tapi Pak Desa membagi bak terlalu besar, jadi nggak merata ini terlalu besar, jadinya gak merata, kecil saja ga papa, asal rata." (Laila, anggota Sekolah Perempuan, 1 Maret 2019)*

Berbekal kemampuan advokasi yang didapatkannya melalui Sekolah Perempuan, Laila - salah satu anggota Sekolah Perempuan, memanfaatkan forum Musrenbangdes untuk mengusulkan pengadaan bak air sebanyak 25 unit dan kakus umum bagi warga pulau. Pada tahun 2017, usulan tersebut disetujui dan sejumlah 15 unit bak air terealisasi. Karena adanya permintaan yang sama dari pulau lainnya, di tahun berikutnya, Laila kembali mengusulkan bak air sebanyak 20 unit. Usulan lain yang diajukan oleh Laila dan telah disetujui di dalam Musrenbang desa adalah fasilitas kakus umum. Karena langkanya keberadaan kakus umum di rumah pribadi warga, perempuan kerap kali harus mandi, buang air besar (BAB), dan buang air kecil (BAK) di laut, termasuk di malam hari. Realisasi pengadaan tiga unit kakus umum di pulau membantu perempuan untuk tidak lagi pergi ke pinggir laut yang tanpa penerangan di malam hari.

### **3.3. Inisiatif mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pulau**

Infrastruktur lain yang tak kalah pentingnya adalah minimnya akses listrik. Identifikasi kebutuhan ini lahir dari salah satu pertemuan di Sekolah Perempuan. Ada ketidakmerataan akses antar pulau dalam desa yang sama. Satu pulau memiliki fasilitas penerangan yang memadai, sementara warga pulau tempat aktivitas Sekolah Perempuan berada, tinggal dalam kegelapan. Satu-satunya yang tersedia hanyalah mesin diesel bantuan dari salah satu calon anggota DPRD Pangkep. Mesin inipun masih harus dioperasikan dengan solar sebagai bahan bakar dan harus dibeli sendiri oleh warga sebesar Rp125.000,00 per bulan. Diesel pun hanya dapat mereka nikmati dari jam 6-10 malam setiap hari. Itu sebabnya, pulau tampak begitu "mati" pada malam hari. Selepas jam sepuluh malam, tidak ada aktivitas berarti. Akibatnya, para perempuan pulau harus terburu-buru mengerjakan semua aktivitasnya saat masih ada penerangan matahari. Mereka harus mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak-anak mereka sembari menjalankan pekerjaan seperti menjahit jaring kepiting tanpa cukup waktu untuk beristirahat.

Anggota Sekolah Perempuan pun sepakat untuk mengadvokasi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tempat tinggal mereka. Mereka mendengar dari beberapa pulau lainnya bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkep sedang memiliki program untuk memberi bantuan berupa PLTS ke beberapa wilayah. Para anggota Sekolah Perempuan, terutama Laila dan Julianti, mengusulkan PLTS untuk pulau tersebut pada tiap kesempatan musyawarah desa maupun Musrenbang desa. Usulan yang sama pun mereka bawa hingga ke Musrenbang di tingkat kabupaten. Julianti sempat melakukan pendekatan-pendekatan kepada kepala desa pada tahun 2015 dan 2016. Laila mewakili Sekolah Perempuan Pulau bahkan pernah menyampaikan langsung usulan PLTS tersebut pada Bupati Pangkep yang sedang mengunjungi pulau untuk kampanye pencalonan kembali di tahun 2015. Cahaya sebagai bagian dari Komite Pemantau Gerakan *Gender Watch* yang mengantongi kontrak politik dari Bupati Pangkep pada masa pencalonannya juga turut mendorong supaya PLTS bagi pulau di desa penelitian termasuk dalam prioritas pembangunan.

*"Setiap ada Musrenbang desa atau Musrenbang kecamatan, kita angkat terus itu, kita butuh penerangan. Tidak ada yang lain diminta selain PLTS, penerangan. Kita pikirnya itu "wah berat di pembayaran yang dari swasta, kalau begini caranya bayar 125 [ribu] per bulan 1 bulan kan ndak terasa, wah sampai kapan kita, penghasilannya pun begini." Kita dengar dari pulau-pulau lain bahwa pemerintah memberikan bantuan, ada bantuan PLTS atau apa kenapa kita tidak minta. Kebetulan ada bupati ke sini kayak kampanye, saya bilang sama bupati "lihat ini pak, lihat kondisi pulau bagaimana, tidak ada penerangan." Dia bilang "oh iya nanti." saya bilang lagi sama bupati "nanti itu sampai kapan Pak, kita butuh kepastian." Akhirnya [Plt. Kepala Desa] undang lagi Sekolah Perempuan angkat terus itu PLTSnya, ingatkan terus bupati. Ibu Cahaya itu kan dia pendamping,*



*jadi ibu Cahaya itu melihat pulau itu paling bawah, urutan paling bawah pulau mendapatkan PLTS. Tapi ibu Cahaya langsung bilang "Pulau ini paling di atas, karena pulau ini diangkat ke atas karena memang pulau ini butuh sekali." Kita makanya bilang ibu Cahaya anggota sekolah, kalau tidak ada orang dalam kalau paling bawah tetap paling bawah. Itu untung juga ada Sekolah Perempuan, syukur-syukur ada Sekolah Perempuan. Kan awalnya kita tidak tahu." (Laila, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Aksi kolaboratif anggota Sekolah Perempuan dengan sesama perempuan dan dengan memanfaatkan jaringan mereka di desa dan kabupaten membuahkan hasil yang signifikan dengan disetujuinya usulan PLTS, yang akhirnya dibangun di tahun 2017 di pulau. Lahan yang dipakai merupakan lahan sewaan milik Haji Ismail. Setiap bulannya, tiap rumah cukup membayar iuran sebesar Rp35.000,00 yang digunakan untuk biaya sewa serta upah bagi operator dan tukang kebun. Aksi kolektif perempuan membawa dampak signifikan tidak hanya pada perempuan saja, tapi juga seluruh warga desa.

### **3.4. Pengakuan Keberadaan Nelayan Perempuan**

Terbentuknya kelompok Sekolah Perempuan di desa pun menarik perhatian Ibu Laila, seorang nelayan perempuan yang tinggal di pulau lain. Ia mendapat ajakan ikut sekolah dari keponakannya yang mengikuti pertemuan sebelumnya. Materi yang ia dapatkan, baik saat pertemuan rutin maupun saat pelatihan kepemimpinan, membuat Ibu Laila memberanikan diri untuk menceritakan permasalahan yang berkaitan dengan keadaannya, terutama mengenai profesi sebagai nelayan. Laila telah mencoba mendaftarkan dirinya sebagai nelayan pada petugas administrasi yang bertugas baik di level kabupaten maupun desa. Pemkab Pangkep memiliki program khusus untuk para nelayan berupa bantuan mesin *katinting*, *jolorok*, tali, dan peralatan melaut lainnya. Tapi tampaknya program ini hanya untuk nelayan laki-laki. Atau diandaikan bahwa semua nelayan adalah laki-laki. Saat ia mendaftar, para petugas ragu dan tidak yakin bahwa ia benar-benar seorang nelayan.<sup>13</sup>

Dalam proses Laila berjuang untuk mendapatkan haknya, ia menceritakan masalah yang ia hadapi dalam bentuk tulisan. Cerita Laila ini diterbitkan di Majalah "Kabar Perempuan Pulau" berisikan kisah keberhasilan maupun kebutuhan anggota Sekolah Perempuan di seluruh area kerja programnya. Majalah ini adalah salah satu dari strategi advokasi yang dilakukan oleh YKPM untuk menyuarakan aspirasi perempuan. Selanjutnya, tulisan yang terkumpul akan diubah ke dalam format digital oleh staf YKPM dan disebarluaskan pada semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten. Menulis kisah tidak hanya merupakan alat advokasi, melainkan juga meningkatkan kemampuan literasi perempuan serta melatih para perempuan untuk mensistematisasi pikiran para perempuan anggota Sekolah Perempuan.

Tulisan Laila yang diterbitkan di majalah Kabar Perempuan Pulau menceritakan tentang perjuangan Cahaya dalam mengadvokasikan pemeriksaan kesehatan reproduksi gratis seperti *papsmear* dan *mammography* bagi para perempuan desa (Laila, 2016). Kisah tentang Laila sendiri juga disusun oleh Badriah dan Nani, anggota Sekolah Perempuan lainnya, di majalah yang sama. Pada artikel tersebut diceritakan bahwa Laila merupakan nelayan perempuan yang sedang memperjuangkan pengakuan atas dirinya sebagai nelayan agar dapat mengakses haknya berupa bantuan mesin maupun kapal kecil untuk mencari kepiting (Badriah, 2016 dan Nani, 2016).

Kisah perjuangan Laila untuk dapat diakui sebagai nelayan perempuan juga dirancang dalam video dokumenter berjudul "Menagih *Katinting* pada Pemerintah" melalui akun YouTube milik YKPM. Dengan dukungan dari YKPM, Laila mendapat kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan Bupati Pangkep

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, Pangkep, 19 Februari 2019.

periode 2015-saat ini, dan mengutarakan kesulitan yang ia temui untuk dapat tercatat sebagai nelayan perempuan di desa penelitian.

*"Pertama pelatihan (merujuk pada pelatihan dari YKPM dan KAPAL Perempuan —pen) tahun 2015. Saya sampaikan sampai gini ke Bupati, "Pak kenapa ini saya ini sebagai nelayan perempuan ini tidak pernah dapat bantuan?" Saya sudah dikasih sama Kak Intan bilang, "ini kesempatan kamu bicara sama Bupati secara langsung" Saya sebagai nelayan perempuan kenapa saya tidak pernah dapat bantuan begini begini, kenapa saya tidak dipercaya sebagai nelayan perempuan. Kemudian bilang Bupati, "iya ada nelayan perempuan?" Iya saya ini sebagai nelayan perempuan ini! Ada juga, bisa liat juga sebagai nelayan perempuan. Terus itu menganggu-anggu kepala saja. Akhirnya saya mengeluarkan melontarkan kata-kata, "kalau Bapak nggak percaya, saya antar keliling pulau, kalau bapak nggak percaya" Terus dia jawab, "nggak usah deh, takut". Untuk mendaftar apa katanya ini, ada kartu nelayan begini-begini, mau tanya, pak dusun itu manggil saya, "kebetulan saya punya adik sepupu kerjanya juga nelayan, sebagai nelayan perempuan apakah bisa didaftar, dibikinkan kartu nelayan atau bagaimana?" Makanya dia panggil saya dulu, ketemu secara langsung itu dari Dinas Perikanan. Kalau dari Dinas Kelautan [merujuk pada Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep] percaya karena dia sering melihat saya di laut, pasang rumput laut." (Laila, nelayan perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

Majalah sebagai alat advokasi aspirasi perempuan pun membuahkan hasil. Kisah hidup Laila didengar oleh aparat kabupaten. Tak lama setelahnya, pegawai Dinas Perikanan pun singgah ke pulau desa untuk melakukan pendataan jumlah nelayan dan akhirnya Laila pun tercatat sebagai nelayan secara resmi. Ia mendapatkan kartu nelayan dan kartu asuransi yang diberikan khusus bagi nelayan sehingga dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan berupa *jolorok* dan mesin *katinting* yang telah lama diharapkannya.

Fase kedua ini memperlihatkan keberhasilan aksi kolektif perempuan pulau, yang difasilitasi oleh Kapal Perempuan dan YKPM, dalam mendorong pemerintah memenuhi kewajibannya memenuhi hak dasar bagi perempuan. Kondisi yang mendukung (*enabling factor*) sangat kuat di fase ini. Kondisi ini juga didukung oleh variasi strategi advokasi yang difasilitasi organisasi masyarakat sipil, sebagaimana dapat dilihat dalam kasus pengakuan nelayan perempuan di Kabupaten Pangkep. Fase ini juga mengindikasikan makin menguatnya relasi dan jaringan Sekolah Perempuan dengan Pemerintah Kabupaten.

#### **4. Fase III: Perubahan Situasi Politik Dan Pemerintahan Desa (2016-2019)**

##### **4.1. Perubahan situasi politik di desa**

Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan aksi kolektif perempuan pulau adalah peran kepala desa. Pada tahun 2016 berlangsung Pilkades di desa penelitian. Daryono terpilih sebagai kades. Ia memiliki mertua, H. Ismail, seorang tokoh sosial yang memiliki pabrik pengolahan kepiting sekaligus pengepul hasil laut. Posisinya sebagai pemilik pabrik, membuat para pekerja enggan padanya, termasuk para perempuan yang bekerja di pabriknya. Saat Pilkades 2016, H. Ismail menggunakan kekuasaan ekonominya meminta pekerjanya, khususnya mereka yang memiliki ketergantungan finansial padanya, untuk memilih Daryono sebagai kepala desa. Daryono pun sangat tergantung pada mertuanya, dan cenderung mengikuti keinginan mertuanya terkait dengan kebijakan strategis desa.

*"Begitu yang kemarin Pak Haji [merujuk pada H. Ismail]) bilang kalau saya terima mau pinjam berapapun saya kasih tapi nanti dijadikan alat untuk menekan si nelayan. Supaya seperti kemarin pemilihan Pak Desa. Kalau tidak mau bantu [merujuk pada upaya memenangkan Daryono, menantunya, sebagai Kepala Desa] ya bayar utangnya. Ya kalau utangnya satu juta dua juta cari di luar. Kalau sampai sepuluh juta, dua puluh juta bahkan ada yang sampai lima puluh juta, ya terpaksa aja dibantu dipilih." (Julianti, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Salah satu penantang Daryono saat Pilkades adalah suami salah satu anggota Sekolah Perempuan. Saat Daryono terpilih sebagai kepala desa yang baru, ia melakukan eksklusi terhadap Sekolah Perempuan, karena

menganggap aksi kolektif perempuan tersebut sebagai basis massa dari rival politiknya. Pemilihan kepala dusun pun berbasis pada kedekatan dengan Daryono dan H. Ismail. Ini termasuk juga posisi ketua RT, Laila yang sebelumnya ketua RT hampir diberhentikan dari jabatannya karena Haji Ismail menghendaki pencopotannya. Akan tetapi, Laila tidak jadi diberhentikan karena kepala dusun tempat ia tinggal merasa puas dengan cara ia bekerja sehingga bersedia membujuk Haji Ismail untuk menanggukannya tersebut.

*“Mungkin akhirnya Pak Dusun udah melihat enak-enaknya dan merasa bagus. Jadi ketika saya mau dikasih keluar sama Pak Haji Ismail, dia tidak mau, justru dia yg mempertahankan saya. Iya pas sudah pelantikan desa, Pak Haji Ismail bilang mencari pengganti ngga usah yang ini. Tapi Pak Dusun nggak mau, Pak Dusun bilang saya berhenti juga jadi dusun, saya gak tau siapa lagi. Dia anak ini gampang disuruh, kerjaan juga bagus.” (Laila, perempuan warga desa, Desa penelitian di Pangkep, 1 Maret 2019)*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan-keputusan desa dalam forum musyawarah desa sangat bergantung pada kehendak H. Ismail. Daryono selaku kepala desa memiliki kepemimpinan dan otoritas formal saja. Ada kekuasaan informal di belakangnya yang memiliki pengaruh jauh lebih besar, yakni mertuanya. Daryono pun hanya memfasilitasi pemenuhan kebutuhan keluarga dan kerabatnya saja, dan meminggirkan warga pulau lain yang mayoritas warga miskin.

*“Yang miskin tidak dapat, yang kaya dapat. Misal Timses [merujuk pada tim sukses Daryono pada Pemilihan Kepala Desa lalu] saja yang diingat. Yang miskin yang dilupakan. Padahal yang perlu kan yang sangat butuh. Susah, mbak. Nggak ada keberanian. Itu tadi misal takut berbicara, takut dengan aparat, salah bicara takut hadap sama polisi. Sedikit-sedikit salah bicara, datang polisi, telepon polisi, meskipun kadang itu fakta.” (Alya, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Inilah titik pergeseran orientasi pemerintah desa terhadap Sekolah Perempuan, yang membawa dampak keseluruhan pada advokasi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh YKPM. Sekolah Perempuan misalnya tidak lagi diundang untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes, sehingga penyampaian aspirasi mengenai kebutuhan perempuan desa menjadi lebih sulit. Karena tokoh-tokoh kunci di desa dan dusun adalah orang-orang yang dekat dengan Daryono, penggunaan Dana Desa pun dikontrol oleh kelompok yang terbatas, tidak lagi bersifat partisipatoris dan transparan sebagaimana di periode sebelumnya. Akibatnya terjadi stagnasi dan penurunan aktivitas dan capaian Sekolah Perempuan di desa penelitian.

Ketika berlangsung pengadaan fasilitas bak air tawar bersih dengan menggunakan Dana Desa, Bilal (bendahara desa) menuturkan bahwa bak air dibeli melalui jaringan bisnis H. Ismail.<sup>14</sup> Sehingga mekanisme yang sebenarnya berjalan dalam memutuskan arah pembangunan maupun pemerintahan desa adalah melalui lobi dengan H. Ismail baik sebelum maupun sesudah pertemuan. Dengan kata lain, proses partisipatoris dalam pengambilan keputusan kebijakan desa tidak lagi berlangsung, karena sentralnya peran H. Ismail.

*“Tapi kalau dengar-dengar lagi dari gosip masyarakat, katanya itu Pak Haji [merujuk pada sosok H. Ismail] itu yang setir Pak Desa. Istilahnya O1-nya. Pak Desa itu katanya cuma pelaksana saja, pelaksana tugas pak desa sebenarnya itu Pak Haji. Banyak gosip-gosip seperti itu, tapi kenyataan sih seperti itu. Bantuan begitu dari Pak Haji juga. Sebenarnya sih kita sudah banyak melanggar dari aturan, kita beli barangnya dulu nanti kalau keluar dananya baru kita bayarkan. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat juga sudah memohon-memohon begini, alternatifnya seperti itu saja, Mbak. Kita pinjam dulu sama Pak Haji. Kita beli barang, kita kasih, nanti itu kayak keperluan dokumennya baru kita ngutang dulu. Untuk bala-bala [perahu berukuran kecil], sama kayak tandon bak-bak air. Biasanya sih kalau saya dengar satu setengah juta. Satu yang oranye besar yang 1.200 liter. Kalau bala-bala tujuh setengah juta kemarin. Kita pun dapat diskon. Kalau ndak diskon sekitar*

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bilal, kaur keuangan desa, desa penelitian di Pangkep, 24 Februari 2019.

*delapan setengah sampai sembilan juta. Dapat tempat beli bala-bala, itu juga pakai jaringan Pak Haji.”(Bilal, kaur keuangan desa, Desa penelitian di Pangkep, 24 Februari 2019)*

Corak politik yang bersifat patronase pasca pergantian kepala desa di tahun 2016 lalu, kemudian menciptakan hambatan bagi aksi kolektif kelompok perempuan pulau untuk melanjutkan keterlibatan mereka dalam musyawarah desa. Resistensi ini dirasakan oleh Julianti, salah satu anggota Sekolah Perempuan, melalui penutupan akses perempuan terhadap Dana Desa.

*“Maunya saya, selama ini kita perlu itu kita nggak tahu usulnya ke mana. Kalau diundang Musrenbang bisa cerita di situ, [salah satu pulau di Pangkep] ini butuh apa. Setelah jabatan Pak Bahrudin [kepala desa sebelumnya] selesai, akhirnya nggak ada lagi. Kemarin saya sempat tanya Bu Sulistiawati [nama kepala dusun di salah satu pulau di Pangkep], “Gimana kalau ada musyawarah dusun?”. Bu Sulis bilang, “Ya boleh sih, tapi saya nggak tahu Musrenbang kapan, jadi musyawarah dusun diadakan kapan?”, gitu jawabannya. Sekolah Perempuan tetep lanjut, bisa bermanfaat, banyak lagi yang merasakan manfaatnya, banyak ibu-ibu yang nggak tau supaya tau gitu, Mbak.” (Julianti, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

#### **4.2. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan**

Seiring terjadinya penurunan peran Sekolah Perempuan para perempuan desa pulau, sebaliknya berlangsung peningkatan jaringan Sekolah Perempuan pulau di arena politik tingkat kabupaten. Salah satu penyebabnya adalah keberhasilan Laila dalam mendapat pengakuan sebagai nelayan perempuan, yang kemudian diekspose secara luas, dan turut mengharumkan nama kabupaten Pangkep. Dengan kata lain, penurunan peran di arena desa, beriringan dengan peningkatan pengaruh di arena kabupaten. Ini menunjukkan bagaimana perkembangan aksi kolektif perempuan pulau tidak selalu berkembang secara progresif dan linear, karena ada alur perkembangan yang berbeda di tingkat desa dan luar desa, yakni kabupaten.

Salah satu pencapaian perempuan desa yang berlangsung di luar desa terkait dengan pencalonan Cahaya, salah satu anggota Sekolah Perempuan sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Cahaya mendapatkan tawaran dari Partai Golkar, sebagai partai terbesar di Pangkep untuk maju sebagai caleg. Ia dipandang partai sebagai figur potensial yang memiliki kedekatannya masyarakat di daerah pemilihannya, terutama perempuan. Pengalaman dan keterlibatannya di dalam berbagai kegiatan di tingkat Kabupaten, membuat Cahaya memiliki jejaring politik dan kedekatan dengan aktor politik di level supra desa.<sup>15</sup>

*“Setelah bergabung dengan Sekolah Perempuan, saya sering ikut pelatihan di Makassar, ingatnya, banyak sekali, saking banyaknya pelatihan, SDG's, 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Hari Perempuan ikut, yang Gender (Watch) juga ikut. Pembentukan tim pemantau, ikut juga. Jadi salah satu koordinator tim pemantau yang disahkan Pak Bupati. Kalau Pak Bupati, kan dulu tahu namanya tapi tidak pernah lihat orangnya. Setelah pembentukan SP (Sekolah Perempuan), sering ketemu, dipertemukan sama YKPM. Diundang sama YKPM, jadi kalau ada masalah mungkin berat, kita bisa sosialisasi sama Pak Bupati, Wakil Bupati. Kalau sama Pak Wakil lebih sering ketemu daripada Pak Bupati. Bahkan akrab dengan Pak Wakil, orangnya nyambung, tidak ada jarak. Dia bisa menerima kita. Kalau ada acara pasti ketemu, atau biasanya diundang juga, memberi materi, sama-sama kita, saya pembicara, Pak Wakil Bupati juga pembicara, di Makassar, acara pemerintahan, acara Sekolah Perempuan. Waktu kontrak politik dulu, saya juga jadi salah satu juru bicara menyampaikan usulan ke calon-calon Bupati-Wakil Bupati.” (Cahaya, Koordinator Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Cahaya, Koordinator Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019.

Kekuatan kapasitas individual Cahaya diperkuat dengan kedekatan Sekolah Perempuan dengan Kepala Bappeda (yang merupakan orang kepercayaan Bupati dan Wakil Bupati). Kepala Bappeda memiliki latar belakang di dunia NGO dan pernah bekerja dalam program pemberdayaan masyarakat di area kepulauan.

*“Ceritanya waktu ditawarkan jadi Caleg, saya juga tidak tahu diriku bahwa mau dianggap layak sebagai Caleg. Ditelepon sama Kepala Bappeda, katanya Bu Cahaya, siap, mau dicalonkan jadi Caleg. Saya tanya, serius itu? Bagaimana prosesnya? Kita tahu kan kalau orang jadi Caleg butuh biaya, saya kan tidak ini Pak. Kata Pak Bappeda, tidak usah nanti kita yang bantu. [Waktu ditawarkan via telepon] Saya menjawab langsung, di telepon, bagaimana Pak, saya tanya dulu keluarga bagaimana ini cerita. Kata Pak Bappeda, tapi mau nggak Cahaya? Kata saya, kalau memang saya harus di ini [dicalonkan] saya akan terima Pak. Akhirnya jalan. Pendaftaran diurus di darat, sering bolak-balik, mana urus surat kesehatan, ambil surat dari kejaksaan, kepolisian, banyak diurus. Biaya ditanggung timbal balik, ada yang ditanggung partai, ada ongkos sendiri. Saya tidak harus mengeluarkan biaya semuanya sendiri. Waktu itu ada pencabutan nomor urut, kebetulan saya tidak ikut pada saat itu, awalnya urutan saya nomor 3, tetapi akhirnya keluar dari KPU nomor 2. Nomor urut 1-nya Pak Plt. Kepala desa dulu.” (Cahaya, Koordinator Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam konteks tersebut, ruang partisipasi politik dalam pencalonan Cahaya sebagai anggota legislatif bukanlah merupakan *‘claimed-space’* – sebuah ruang yang diklaim secara aktif dan menggambarkan intensitas kekuatan agensi dari perempuan. Ruang partisipasi politik ini merupakan manifestasi dari sebuah *‘invited-space’* – yang meskipun diciptakan oleh elit politik di tingkat kabupaten, bukan berarti tidak memberi ruang bagi agensi perempuan desa. Terlepas dari itu, ruang ini justru menjadi sebuah jembatan baru bagi perempuan di level desa untuk mempraktikkan agensi mereka di tingkat kabupaten, membekali perempuan desa dengan pengalaman politik, berproses dan terintegrasi dalam dinamika politik di level supra Desa. Pengalaman politik tersebut, sejalan dengan peningkatan kepercayaan diri untuk tidak sekedar menitip nasib kepada elit politik yang selama ini bahkan tidak terjangkau oleh perempuan desa, melainkan memperkuat kesadaran politik bagi Cahaya sebagai salah satu perempuan yang berpengaruh untuk menyuarkan aspirasi dan membawa perubahan di komunitasnya.

*“Perasaannya ya campur-campur, merasa kok bisa saya ya? Begitu. Kok bisa, kenapa saya, ada juga satu kebanggaan, ternyata kita juga perempuan bisa mewakili dan bicara. Tidak pernah terbayang sebelumnya kita bisa mengadakan kontrak politik sama pemerintah, bisa maju jadi caleg, tidak terbayang sebelumnya. Kita kan dari kalangan bawah, ternyata bisa juga bersuara.” (Cahaya, Koordinator Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)*

Selain pengalaman politik individual bagi Cahaya, Sekolah Perempuan Pulau juga aktif melakukan serangkaian aksi dan intervensi secara kolektif sebagai bentuk partisipasi dalam politik sehari-hari di desa. Salah satunya adalah dengan mendirikan “Pos Pengaduan Program Perlindungan Sosial” di sebuah kios kecil milik salah satu anggota Sekolah Perempuan yang terletak tepat di seberang Kantor Kepala Desa. Pemilihan lokasi tepat di seberang Kantor Desa dilakukan bukan secara acak, melainkan secara sistematis. Pos pengaduan ini menjadi pernyataan sikap simbolik bahwa Sekolah Perempuan akan selalu mengawasi semua program perlindungan sosial yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa. Di bagian depan kios tersebut dipasang spanduk besar bertuliskan “Pos Pengaduan Program Perlindungan Sosial Sekolah Perempuan Pulau: (dengan daftar nama program di bawahnya) Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan, Program Pemerintah Lainnya”. Terlebih, kios tersebut sangat strategis karena selain menjadi tempat bagi perempuan di desa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kios ini juga menjadi tempat untuk bertukar gosip, cerita dan informasi seputar berita tentang penyaluran bantuan dan

program pemerintah di desa. Pendek kata, kios ini sangat mudah diakses, dekat dengan dermaga pulau, dan menjadi 'ruang aman' bagi perempuan desa untuk bercerita dan bercengkrama satu sama lain.<sup>16</sup>

### **4.3. Upaya Sekolah Perempuan dalam Menanggapi Perubahan**

Adanya perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan di desa penelitian turut mengubah pola relasi antara Sekolah Perempuan dengan struktur kekuasaan desa. Pemerintah desa, terutama sosok kepala desa, yang sebelumnya begitu suportif dan melibatkan anggota Sekolah Perempuan secara aktif, telah berganti menjadi perpanjangan tangan dari politik bercorak patronase yang dikontrol oleh satu "orang kuat" desa.

Perubahan ini melemahkan Sekolah Perempuan. Mereka tidak lagi mendapat undangan Musrenbang, dan juga dieksklusi dari proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Beberapa dari mereka bahkan tidak lagi dapat mengakses bantuan yang sedianya dibagikan oleh pemerintah desa, seperti alat tangkap ikan dan kepiting maupun bak air.<sup>17</sup> Adanya sentimen bahwa Sekolah Perempuan merupakan basis massa dari lawan politik Daryono pada masa Pilkada menimbulkan keengganan dari Daryono untuk merangkul mereka, ditambah dengan pandangan Haji Ismail yang menganggap sifat advokatif dari anggota Sekolah Perempuan sebagai "tukang protes".<sup>18</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut, Sekolah Perempuan kemudian mengadakan diskusi internal yang berkesimpulan bahwa praktik eksklusi atas mereka dalam mekanisme formal seperti musyawarah akan dihadapi dengan memanfaatkan anggota mereka yang menempati jabatan dalam pemerintahan. Artinya, anggota Sekolah Perempuan seperti Laila dan Rini (Ketua RT), dan Almaida (Kepala Dusun), menjadi sentral. Merekalah yang akan berperan membantu akses untuk Sekolah Perempuan yang telah tertutup. Mereka ditugasi menginformasikan jadwal pertemuan desa pada anggota Sekolah Perempuan yang lain. Hal ini utamanya ditujukan pada Laila yang tidak memiliki kedekatan apapun dengan Haji Ismail.

Selain itu, Sekolah Perempuan juga mencoba memanfaatkan posisi Cahaya yang dicalonkan sebagai anggota legislatif Pangkep pada Pemilu tahun 2019. Apabila Cahaya terpilih, Sekolah Perempuan berniat untuk mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas di desa terutama terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam tata kelola anggaran desa, dari sisi politik Kabupaten (sebagai anggota DPRD). Namun, Cahaya tidak terpilih, dan situasi desa dalam kepemimpinan Daryono tetap tidak menguntungkan bagi Sekolah Perempuan.

## **5. Strategi Pembentukan Sekolah Perempuan oleh KAPAL Perempuan dan Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM)**

### **5.1. Kemitraan KAPAL Perempuan dan YKPM**

Keberhasilan pembentukan Sekolah Perempuan di desa penelitian dalam meningkatkan kapasitas perempuan pulau di fase I dan II tidak terlepas dari peran pendampingan yang dilakukan oleh KAPAL Perempuan, dan mitranya YKPM untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten ke desa, untuk menciptakan iklim yang kondusif (*enabling*) dalam pembentukan Sekolah Perempuan Pulau di desa.

#### *KAPAL Perempuan*

KAPAL Perempuan sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk membangun gerakan sosial, terutama gerakan perempuan, yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan, keadilan

<sup>16</sup> Catatan Observasi Peneliti, desa penelitian di Pangkep, 21 Februari 2019.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Azahra, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019; Wawancara dengan Lulu, anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Cahaya, koordinator Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019.

gender serta perdamaian (Institut KAPAL Perempuan, tanpa tahun). Didirikan pada 8 Maret 2000, KAPAL Perempuan berfokus pada kerja-kerja pelatihan pendidikan kritis feminis, riset dan publikasi mengenai pengembangan konsep kepemimpinan perempuan sekaligus advokasi pada isu hak perempuan, pendidikan, kebijakan pluralistik, dan pelayanan publik.

Sebagai mitra dari Program MAMPU yang berfokus pada isu perlindungan sosial, KAPAL Perempuan menerapkan pelibatan sub-mitra sebagai karakteristik hubungan utama yang dibangun dengan aksi kolektif perempuan di tingkat lokal. Jenis hubungan tersebut memungkinkan KAPAL Perempuan untuk membentuk kemitraan dengan kelompok masyarakat sipil dengan fokus isu yang sama. Sub-mitra dari KAPAL Perempuan-lah yang kemudian membentuk maupun mendukung kelompok-kelompok aksi kolektif perempuan sehingga peranannya menjadi lebih dominan.

#### *Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM)*

Sub-mitra yang bertanggungjawab untuk menjalankan Program MAMPU pada isu perlindungan sosial di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) hingga tahun 2020 adalah Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM). Relasi antara KAPAL Perempuan dengan YKPM sudah terjalin sejak sebelum keduanya bekerjasama menjalankan Program MAMPU pada pertengahan tahun 2013. Sebelumnya kedua LSM tersebut sudah pernah menjalin kerjasama dalam melaksanakan program Audit Gender Berbasis Komunitas (AGBK) yang didanai oleh Ford Foundation. Sedangkan untuk menjadi sub-mitra Program MAMPU, YKPM mengajukan proposal kerjasama sebagai proses seleksi yang dilakukan oleh KAPAL Perempuan.

YKPM merupakan LSM yang didirikan pada 20 Juli 1989 di Makassar, Sulawesi Selatan (Sari, Madjid, dan Ridha, 2018). Tak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, YKPM juga bergerak di isu-isu demokrasi.<sup>19</sup> Dalam menjalankan program kerjasama dengan KAPAL Perempuan yang dibiayai oleh MAMPU di Kabupaten Pangkep, YKPM melakukan lobi awal dengan pemerintah daerah, utamanya dengan sosok Bupati Pangkep.

## **5.2. Membangun relasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten**

Di awal pembentukan Sekolah Perempuan untuk para perempuan pulau, anggota YKPM melakukan pendekatan dengan Bupati Pangkep melalui pertemuan informal di warung kopi langganan bupati. Lobi yang dilakukan pun berjalan dengan lancar karena sikap terbuka dari Bupati Pangkep terhadap berbagai program yang berjalan di wilayah kepemimpinannya. Keterbukaan yang sama juga tampak dari sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam berkoordinasi dengan program-program dari LSM yang beroperasi di Pangkep. Pemerintah Kabupaten Pangkep menganggap kegiatan yang dilakukan elemen masyarakat sipil sangat membantu pemecahan masalah di wilayahnya. Relasi yang dibangun dengan pemerintah di tingkat kabupaten membuahkan dua hasil utama, yakni penandatanganan nota kesepahaman mengenai *Gender Watch*, dan juga penetapan replikasi Sekolah Perempuan di desa-desa lainnya di Kabupaten Pangkep.

#### *Nota Kesepahaman (MoU) terkait Gender Watch*

Nota kesepahaman ini merupakan pelembagaan relasi yang terbangun di tingkat kabupaten, serta sebagai fondasi dan langkah awal advokasi di tingkat kabupaten. Pada tahun 2014, Institut KAPAL Perempuan dan YKPM Sulsel melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait *Gender Watch* bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep Bersama. Program *Gender Watch* ini merupakan kegiatan evaluasi berbasis-gender terhadap program-program pembangunan, termasuk perlindungan sosial dan bantuan sosial di Kabupaten Pangkep.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Priadi, staf advokasi YKPM, Makassar, 5 Maret 2019.

*“Duduk bersama. Peran kita di Bappeda itu ada satu ruangan yang kita siapkan untuk semua program NGO di Bappeda, termasuk untuk program MAMPU, Oxfam, KOMPAK, ada juga HKI Helen Keller. Kita juga memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berkoordinasi, atau panggil dinas-dinas terkait, karena memang fungsinya Bappeda itu fungsi koordinasi dengan dinas-dinas. Jadi setidaknya kalau ada kepentingan, ada urusan misalnya, perlunya dihadirkan dinas-dinas yang lain.], dengan adanya ruang di Bappeda dipersiapkan itu kan, lebih memudahkan koordinasi komunikasi dengan dinas-dinas yang lain. Termasuk juga kita persilahkan memanfaatkan empat kelompok temuan di Bappeda. Artinya, bahwa keberhasilan kan tidak pernah pergi sendiri, pasti banyak faktor yang memengaruhi sehingga kita berharap program yang ada, berkoordinasi, kolaborasi dengan yang lain, termasuk juga dari APBD, termasuk juga dari sumbangan-sumbangan lainnya.” (Kepala Bappeda tingkat kabupaten, Pangkep, 19 Februari 2019)*

*“Selain SK Bupati tentang tim pemantau ini sejauh ini dihasilkan terkait dengan legal, formalisasi itu yang MoU dengan para calon, calon Bupati. Dia berkomitmen untuk siapa itu. Nah itu memang Sekolah Perempuan yang kita coba membangun komunikasi dengan kabupaten atau Polres. Ini kan seperti Tim Pemantau itu yang kita bangun sebelum debat. Waktu itu kan seluruh visi misi masing-masing calon kita kumpulkan baru kita bahas satu-satu dengan teman-teman Sekolah Perempuan. Setelah clear, itu kita perdalam, apapun saja dengan kandidat Sekolah Perempuan setuju atau tidak dengan visi misi mereka. Jadi termasuk salah satunya Komite Pemantau kan, karena itu kan kenapa kita libatkan media karena bisa memastikan bahwa untuk kabupaten betul-betul menjalankan komitmennya. Dan itu makanya kemudian kita, apa namanya, dijalankan kita tunggu setiap tiga bulan kita ketemu Bupati. Kemudian setiap bulan kita panggil kepala desa untuk adakan talkshow. Itu lain, jadi baik dalam masyarakat sampe itu ya interaktif begitu.” (Priadi, staf Advokasi YKPM, Makassar, 5 Maret 2019)*

Pada tahun 2013, YKPM melakukan analisis dan audiensi dengan Bupati Pangkep yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa prioritas kegiatan pemberdayaan perempuan akan dilakukan di wilayah kepulauan, karena pembangunan dan pemberdayaan selama ini belum merata sampai ke wilayah kepulauan. Oleh karena itu, bersama dengan desa di area kepulauan lainnya, desa lokasi penelitian ditargetkan menjadi daerah pembentukan kelompok Sekolah Perempuan sebagai bagian dari pelaksanaan program hasil kerjasama dengan KAPAL Perempuan.

#### *Replikasi Sekolah Perempuan*

Proses pembentukan dan penguatan Sekolah Perempuan juga dilakukan oleh YKPM di area Kepulauan Pangkep selama kurun waktu tahun 2014-2016. Berbekal adanya keberhasilan Sekolah Perempuan di desa-desa di area kepulauan ini, YKPM kemudian menindaklanjuti advokasi untuk melakukan *upscaling* (perluasan) Sekolah Perempuan di area lainnya yang masih tertinggal di daerah Pangkep non-kepulauan, yakni area daratan pedalaman dan pegunungan. Upaya advokasi ini dilakukan oleh YKPM melalui pertemuan dan diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai hasilnya pada tahun 2018 telah ditetapkan replikasi Sekolah Perempuan melalui Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 556 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Replika Sekolah Perempuan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018. Lokasi replikasi ditetapkan di empat desa di area daratan dan pegunungan yang letaknya cukup terpencil dan masuk ke dalam kategori daerah miskin. Pembiayaan replikasi sekolah perempuan di empat desa ini dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Keputusan Bupati ini, juga menetapkan Staf YKPM sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan replikasi ini agar strategi dan langkah-langkah pembentukan Sekolah Perempuan dapat diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten.



### 5.3. Pendekatan di tingkat desa

Untuk masuk ke desa, YKPM melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, utamanya pada kepala desa yang saat itu sedang menjabat. Tak hanya menjalin relasi baik dengan kepala desa untuk mendapatkan dukungan, YKPM juga mengajak staf perempuan dari pemerintah desa untuk ikut terlibat dalam Forum Multipihak. Relasi yang terbangun dengan pemerintah desa, terutama dengan keberadaan Forum Multipihak, selanjutnya menjadi dasar bagi YKPM untuk memperoleh dukungan baik dalam pembentukan maupun bagi perkembangan dari Sekolah Perempuan itu sendiri.

#### *Pendekatan kepada perempuan desa melalui metode live-in*

Strategi lanjutannya dalam membentuk kelompok Sekolah Perempuan, YKPM melalui staf lapangannya juga melakukan sosialisasi pada warga desa khususnya kalangan perempuan miskin yang berusia kurang dari 50 tahun. Dengan bantuan dari pemerintah desa, staf lapangan YKPM tinggal di kediaman perangkat desa perempuan untuk dapat memetakan target potensial anggota kelompok Sekolah Perempuan, dan untuk membangun *trust* dari warga. Mereka pun mulai melakukan sosialisasi program dari rumah ke rumah untuk mengajak para perempuan desa bergabung dengan Sekolah Perempuan.

Untuk mengajak para perempuan desa menjadi bagian dari kelompok Sekolah Perempuan, staf lapangan YKPM melakukan metode *live in* di kediaman aktor perempuan potensial. Staf YKPM mengikuti kegiatan keseharian para perempuan desa dalam rangka memperoleh kepercayaannya (*social ingratiation*). Misalnya, ketika sekumpulan perempuan desa *massire-sire* (aktivitas mengikat jaring), staf lapangan dari YKPM akan mengikuti kegiatan tersebut sembari bercerita mengenai keuntungan yang bisa didapatkan oleh para perempuan tersebut apabila mereka bergabung dalam Sekolah Perempuan. Pada konteks ini, penguasaan bahasa Bugis yang merupakan bahasa utama di desa menjadi poin sangat penting dalam berkomunikasi dan untuk dapat diterima menjadi bagian dari mereka.

*“Kak Intan datang satu-satu rumah, jadi diajak mau ikut ini tidak, Sekolah Perempuan. Jadi penyampaiannya dulu ada pemberdayaan perempuan, perempuan diajarkan walaupun tidak sekolah, tidak tahu menulis bisa ikut. Saya langsung “mau kak” karena di pikiran saya waktu itu ingin melanjutkan belajar. Saya selalu ingin melanjutkan sekolah sampai kuliah. Tapi karena kendala adatnya orangtua, anak perempuan tidak boleh melanjutkan sekolah karena banyak yang ditakutkan sehingga saya putus sekolah. Takut hamil di luar nikah, pikirannya orangtua dulu di situ. Jadi cuma sampai SD.” (Julianti, perempuan warga desa, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

#### *Pendekatan ke pemerintah desa*

Selain membangun kedekatan dengan masyarakat desa terutama perempuan dalam upaya membentuk Sekolah Perempuan, YKPM juga melakukan lobi dengan pemerintah desa, yaitu pejabat pelaksana tugas (Plt.) kepala desa, yang ditugaskan dari kecamatan, untuk menggantikan kepala desa yang pada waktu itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kabupaten Pangkep.

Lobi yang dilakukan berjalan lancar, terbukti dengan adanya kedekatan antara Plt. Kepala desa dengan para anggota Sekolah Perempuan yang acapkali ia jadikan sebagai mitra strategis dalam menangani beberapa persoalan seperti administrasi desa termasuk pendataan demografi warga dan jumlah warga yang layak menjadi penerima bantuan tertentu. Di sini kita bisa melihat bahwa respon kepala desa terkait juga dengan aspek kemanfaatan yang mereka dapatkan dari keberadaan organisasi masyarakat sipil yang ingin beraktifitas di desa.

*“Maksudnya seperti ikut Musrenbang kalau ada pendataan dihubungi, ini ada pendataan tolong didata ada, warga sekian warga ini tolong pergi didata. Terlibat masalah pendataan, rapat-rapat, seperti Musrenbang terus penambahan pemberi makanan anak balita di Posyandu. Kaya waktu ini ada rumah warga yang kena angin*

*puting beliung saya ditelepon malam malam jam 11, begini saya kan tidak tahu kalau ada masalah begitu. Ini pak Binmas kemarin, dia telepon "Julianti, ini ada masalah di kampung ada kena angin puting beliung" Pagi pagi sekali saya langsung jalan melihat oh ternyata iya. Pak [Plt. Kepala desa] juga menelfon "katanya ada berapa rumah?" saya jalan mendata kerusakannya sekian terus saya kirim ke Pak [Plt. Kepala desa]. Saya juga kirim fotonya dan telepon tim penanggulangan bencana. Saya telepon akhirnya dia turun melihat rumah warga, kemudian ada satu hari dua hari sudah ada bantuannya, saya juga dipanggil untuk pembagian untuk penerimaan bantuan. Jadi ada waktu bantuan sembakonya datang, itu dipercayakan juga kepada kami anggota Sekolah Perempuan untuk membagikan." (Julianti, Anggota Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)*

## 6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terbentuknya dan Kegiatan Sekolah Perempuan

Menelusuri sejak awal proses pembentukan Sekolah Perempuan Pulau serta pendampingan yang dilakukan oleh KAPAL Perempuan dan YKPM, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung terciptanya perubahan sebagaimana dicita-citakan oleh Sekolah Perempuan Desa:

**Pertama**, adanya kesadaran dan kebutuhan dari anggota Sekolah Perempuan sendiri untuk secara aktif mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan, baik mengenai kapasitas kepemimpinan perempuan maupun kemampuan advokasi program perlindungan sosial secara khusus terutama pada tingkat desa, yang berguna bagi diri mereka sendiri.<sup>20</sup>

**Kedua**, koordinasi Sekolah Perempuan yang menekankan tercapainya perubahan dengan upaya-upaya kolektif, terutama terkait dengan kesepakatan internal Sekolah Perempuan dalam menyikapi salah satu anggotanya yang di kemudian hari menjadi bagian dari elit desa atau kabupaten agar anggota tersebut dapat mendorong keberlangsungan agenda yang dimiliki oleh kelompok. Hal ini dianggap perlu karena Sekolah Perempuan tidak lagi diikutsertakan dalam agenda musrenbang setelah adanya pergantian kepemimpinan di desa.

**Ketiga**, komunikasi yang terjalin baik dan responsif dengan CSO mitra lokal (YKPM). Hal ini berpengaruh terhadap perluasan jejaring Sekolah Perempuan untuk melakukan perubahan, yang mencakup: akses terhadap dukungan dari elit desa dan kabupaten; akses informasi terutama terkait program perlindungan sosial yang hendak diadvokasikan; kerjasama dengan unit-unit penanggungjawab program yang diadvokasikan baik di tingkat desa maupun kabupaten; kondisi pemerintahan terutama di tingkat desa yang memastikan terbukanya saluran aspirasi publik dan bersedia menindaklanjutinya dengan pertimbangan yang mengedepankan kepentingan bersama.

**Keempat**, dukungan dari pemerintah Kabupaten Pangkep pada kegiatan Sekolah Perempuan. Meski desa memiliki otonomi politik yang penuh dan tidak bisa dikontrol oleh kabupaten, ada hal yang kabupaten tetap berperan sentral melalui fungsi regulasinya. Dana Desa memiliki elemen yang sumbernya berasal dari kabupaten, sehingga kabupaten tetap memiliki otoritas mengontrol desa. Selain itu, jaringan yang kuat di tingkat kabupaten menjadi salah satu strategi cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh aksi kolektif perempuan di saat kondisi desa tidak kondusif secara politik.

Berbagai kerja advokasi di berbagai level pemerintahan yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan bersama dengan YKPM menghasilkan berbagai bentuk dukungan yang memungkinkan perubahan di level formal dan informal. Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Cahaya, koordinator Sekolah Perempuan, Desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019; Wawancara dengan Azahra, anggota Sekolah Perempuan, Desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019; Wawancara dengan Lulu, anggota Sekolah Perempuan, Desa penelitian di Pangkep, 22 Februari 2019; Wawancara dengan Rini, anggota Sekolah Perempuan, Desa penelitian di Pangkep, 23 Februari 2019; Wawancara dengan Robiah, anggota Sekolah Perempuan, Desa penelitian di Pangkep, 24 Februari 2019.

- a. Formal: Pelibatan Sekolah Perempuan dalam program kerja sebagai mitra potensial, pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.
- b. Informal: Lobi yang dilakukan oleh pihak YKPM pada elit di desa maupun kabupaten, ketersediaan akses informasi oleh pemerintah daerah mengenai program yang diadvokasi, dan kesiapan masyarakat menerima dan mengaplikasikan perspektif adil gender.

Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangkep sebagai berikut:

*“Tapi sekarang ya alhamdulillah di kabupaten kita ya kalau bilang koordinasi ya luar biasalah tapi yang mendasar inikan yang sangat penting di level desa bahwa misalnya Sekolah Perempuan itu berhasil membangun kesadaran kaum perempuan untuk mereka berpartisipasi aktif dalam banyak hal-lah di pembangunan bahkan sekarang kan ada salah satu dari Sekolah Perempuan itu namanya Cahaya itu masuk caleg. Kenapa begitu? Ini penting, supaya ada perwakilan mereka. Nantinya kalau dia terpilih misalnya itu mendorong menyuarakan. Artinya apa? Kita tidak boleh politis berseteru harus ruang politik itu harus dimasuki karena di sana pintu kewenangan-kewenangan kebijakan ada. Artinya memang harus dinamis kita. Dan karena di Sekolah Perempuan itu mereka banyak berinteraksi diskusi apa semua ketemuan apa di mana kemudian jadi percaya diri akhirnya dari sebelumnya misalnya mereka tidak terpikir bisa menjadi caleg akhirnya bisa karena mereka sudah mampu dikapasitasi, menarik itu Sekolah Perempuan itu, saya sangat berharap mudah-mudahan ini bisa dijadikan satu model untuk konsep-konsep pemberdayaan di Indonesia. Terus terang kita sudah kenal banyak program dan melihat program ini masih yang terbaik yang kami kenal ada misalnya sebut saja kalau dari OXFAM ada exile, brainstorm lebih untuk pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir itu ada, kita kenal itu tadi program kornet, ada juga program mandiri panganlah banyak kita kenal tapi ini yang menurut kami ini yang luar biasa ini Sekolah Perempuan. Bukan karena ibu lagi tanyakan kami itu tapi di mana-mana kita ngomong itu Sekolah Perempuan luar biasa itu bahkan mereka misalnya sekolah di pantai sambil pertemuan pelatihan di sini mereka minta digaji kan datang ke sini pertemuan, dari Makassar-lah kan dah digaji dan mereka berhasil mendobrak semacam tradisi lama bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi tidak usah sibuk-sibuk keluar tidak usah tinggalkan rumah. Artinya secara bertahap mereka mampu menjadi contoh-lah itu luar biasa menurut kami.” (Kepala Bappeda tingkat kabupaten, Pangkep, 19 Februari 2019)*

Lebih lanjut, pendekatan YKPM pada tingkat kabupaten ini dilakukan untuk mendorong desa dampingan mereka, termasuk desa yang menjadi lokasi penelitian, agar mengeluarkan peraturan desa yang menyatakan bahwa Sekolah Perempuan merupakan mitra strategis desa. Dengan demikian, diharapkan posisi tawar Sekolah Perempuan dapat meningkat dalam proses pembangunan di desa.

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor yang menghambat. Sebagaimana telah dipaparkan dalam fase III perjalanan Sekolah Perempuan di desa kepulauan, pergantian kepala desa menjadi faktor penghambat keberlanjutan kegiatan Sekolah Perempuan yang telah sangat baik di fase I dan II. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa aksi kolektif perempuan di desa sangat sensitif terhadap perubahan pergantian kekuasaan di desa. Kepala desa yang dulu sangat terbuka, menjadi sangat tertutup. Kepala desa melihat Sekolah Perempuan sebagai ancaman bagi pembangunan desa, ketimbang sebaliknya. Hal ini disebabkan karena pengaruh figur di belakang kepala desa yang juga aktor kuat dalam bidang ekonomi desa.

## Penutup

Dari studi kasus ini dapat terlihat bagaimana pengorganisasian aksi kolektif perempuan melalui Sekolah Perempuan Pulau telah menjadi katalisator perubahan, baik di tingkat individu, kolektif, maupun masyarakat secara luas. Pada tingkat individu, keterlibatan para perempuan miskin dalam kegiatan pelatihan Sekolah Perempuan memfasilitasi mereka dalam mengasah kemampuan intrinsik dan praktis, seperti kepercayaan diri, kesadaran kritis mengenai kesetaraan gender, kepemimpinan, dan pengetahuan mengenai hak dan akses terhadap program perlindungan sosial. Pada tingkat kolektif, peningkatan kemampuan perempuan membuat mereka mampu terlibat di dalam forum musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan perempuan. Usulan-usulan yang mereka perjuangkan di dalam forum-forum tersebut telah menghasilkan alokasi Dana Desa untuk kegiatan simpan pinjam perempuan, serta

keberadaan fasilitas dasar bagi masyarakat umum seperti bak air, fasilitas sanitasi, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Keberhasilan upaya advokasi perempuan terjadi karena dukungan kuat dari jejaring mereka di desa dan kabupaten. Di tingkat kabupaten, nota kesepahaman antara KAPAL Perempuan dan YKPM serta Pemerintah Kabupaten Pangkep merupakan fondasi penting bagi relasi yang terbangun. Selain itu, keberhasilan Sekolah Perempuan Pulau telah mendorong penetapan perluasan (*upscaling*) Sekolah Perempuan di empat desa lain di wilayah non-kepulauan di Kabupaten Pangkep. Sebaliknya di tingkat desa, perubahan situasi politik pasca pergantian kepala desa telah melemahkan dukungan bagi Sekolah Perempuan, dan kembali mengeksklusi mereka dari forum pengambilan keputusan di desa. Proses advokasi peraturan desa yang dapat melegitimasi keberadaan Sekolah Perempuan pun menjadi stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan norma sosial yang ada baru terjadi secara parsial and perlahan.

Bertolak belakang dengan melemahnya dukungan di desa, partisipasi politik perempuan di tingkat kabupaten dan desa justru menguat. Salah satu ketua kelompok Sekolah Perempuan dicalonkan sebagai anggota DPRD dan mendapat dukungan dari jaringan tokoh elit di kabupaten. Walau ia tidak berhasil dalam pencalonannya, partisipasi politik perempuan ini merupakan manifestasi agensi perempuan pulau untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari di pulau, perempuan mewujudkan partisipasi politik mereka melalui pendirian pos pengaduan program perlindungan sosial. Pos ini mewujudkan aksi kolektif perempuan agar tetap dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di pulau, walau hanya secara informal. Pos ini sekaligus bertindak sebagai sikap simbolik perempuan untuk tetap mengawasi proses pembangunan walau di tengah situasi politik desa yang tidak kondusif, serta sebagai wadah penggalangan solidaritas dan berbagi informasi bagi sesama perempuan pulau.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana peningkatan kemampuan intrinsik dan praktis perempuan pulau serta pengembangan jejaring perempuan membuat mereka mampu menyuarakan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan membawa perubahan positif yang lebih luas di antara masyarakat pulau. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa perkembangan aksi kolektif perempuan tidak selalu berjalan secara linear, positif, maupun progresif. Dengan kata lain, perkembangan gerakan perempuan bisa berbeda antara tingkat desa dan tingkat kabupaten. Namun demikian, dukungan berkesinambungan dan penguatan jaringan dengan pemerintah desa dan kabupaten dapat memberikan kesempatan guna memastikan keberlanjutan aksi kolektif perempuan pulau.

## Bibliografi

- Badriah [bukan nama sebenarnya], 2016. Perempuan Pejuang Pangan dalam *Kabar Perempuan Pulau*. Makassar: Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat.
- BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2018. Kecamatan Desa penelitian di Pangkep Dalam Angka 2018. Pangkajene: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Cahaya [bukan nama sebenarnya], 2015. Terlibat dalam Forum SKPD dalam *Kabar Perempuan Pulau*. Makassar: Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Institut KAPAL Perempuan, tanpa tahun. Profil dan Program KAPAL Perempuan, diakses 12 Februari 2020: <<http://kapalperempuan.org/profil/sejarah>>.
- Laila [bukan nama sebenarnya], 2016. Perjuangan Ibu Cahaya Untuk Perempuan Pulau dalam *Kabar Perempuan Pulau*. Makassar: Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Nani [bukan nama sebenarnya], 2016. Menulis Cerita Perempuan Melalui Film dalam *Kabar Perempuan Pulau*. Makassar: Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Pemerintah Desa, 2019. Infografis Desa Penelitian Tahun 2017. Desa Penelitian: Pemerintah Desa.
- Sari, A., Madjid, M.S., dan Ridha, M.R., 2018. Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan 1989-2017 dalam *Jurnal Patingalloang Vol 5 No 3 Juli 2018*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.